



**KONSTRUKSI LAPORAN NILAI TAMBAH SYARIAH
PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI, Tbk**

SKRIPSI

Oleh

TIAS IFTITAH

110810301097

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER**

2016



**KONSTRUKSI LAPORAN NILAI TAMBAH SYARIAH
PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI, Tbk**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

TIAS IFTITAH

110810301097

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER**

2016

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Konstruksi Laporan Nilai Tambah Syariah pada PT. Bank
Syariah Mandiri, Tbk.
Nama Mahasiswa : Tias iftitah
NIM : 110810301097
Jurusan : S-1 Akuntansi
Tanggal Persetujuan : 14 November 2015

Yang Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E,M.Si

NIP. 197809272001121002

Dr. Achmad Roziq, SE, M.Si, Ak

NIP. 197004281997021001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi,

Dr. Muhammad Miqdad, S.E, MM, Ak.

NIP. 197107271995121001

JUDUL SKRIPSI**KONSTRUKSI LAPORAN NILAI TAMBAH SYARIAH
PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI, Tbk**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Tias Iftitah
NIM : 110810301097
Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

15 Februari 2016

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua : **Novi Wulandari W,SE,M.Acc&Fin** (.....)
NIP 19801127 200501 2 003

Sekretaris : **Dra. Ririn Irmadariyani, M.Si, Ak.** (.....)
NIP. 19670102 199203 2 002

Anggota : **Septarina Prita DS, SE, M.Si, Ak.** (.....)
NIP. 19820912 200604 2 002

Mengetahui/Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi
Dekan,

Dr. Moehammad Fathorrazi, M.Si
NIP. 19630614 199002 1 001

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ayahanda Slamet Musthofa, S.Pd.I dan Ibunda Sri Sakti SH tercinta, yang selama ini telah merawat dan mendidik saya dengan penuh kasih sayang serta senantiasa memberikan dukungan, doa, dan pengorbanan terbaik untuk anak-anaknya;
2. Adikku Agis Fatahillah serta seluruh keluarga besar yang memberiku semangat dan motivasi dalam kebersamaan,
3. Mas Galuh Irawan yang senantiasa mendoakan dan mendukung tiada henti,
4. Almamater Fakultas Ekonomi Universitas Jember yang saya banggakan.

MOTTO

Bersungguh – sungguhlah dalam kebaikan,
sesungguhnya kebaikan itu untuk dirimu sendiri

- Self Reminder -

Pilihan Allah takkan pernah Salah,
Istikharah dan libatkan Dia dalam setiap langkah serta pengambilan keputusan
dalam hidup, tempatkan Allah pada posisi pertama
bukan menjadi yang terakhir sebagai penampung lara.

Pilihlah sesuatu yang kita yakini Allah sukai
bukan hanya apa yang kita sukai.

- Anonim -

Penulis

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tias Iftitah

NIM : 110810301097

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Konstruksi Laporan Nilai Tambah Syariah pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk.” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 15 Februari 2016

Yang menyatakan,

Tias Iftitah

NIM 110810301097

SKRIPSI

**KONSTRUKSI LAPORAN NILAI TAMBAH SYARIAH
PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI, Tbk**

Oleh

Tias Iftitah

NIM 130810301148

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Agung Budi Sulistiyo, SE, M.Si, Ak

Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Achmad Roziq, S.E,M.M, Ak

Tias Iftitah

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember

ABSTRAK

Konsep nilai tambah syariah adalah konsep yang dilakukan untuk memberikan manfaat yang tidak hanya memberikan manfaat kepada stakeholders tetapi juga memberikan keadilan kepada masyarakat dan memberikan nilai ketundukan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang didapatkan secara halal dan bebas dari riba'. Nilai Tambah syariah ini dapat memberikan dampak yang bagus kepada stackholder atau pemegang saham karena dengan menggunakan konsep ini bisa menjauhkan dari nilai-nilai egois dalam diri. Dengan adanya nilai ketundukan dan keadilan dapat memberikan manfaat berupa meningkatkan kejujuran dalam diri, nilai sosial serta meningkatkan kadar spiritual dalam diri seseorang. Proses penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan nilai tambah syariah yang ada di masyarakat yang sesuai dengan realita yang ada dan sejalan dengan ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Menggunakan fenomenologi tidak hanya menggunakan pemikiran atau dalam akal yang dimiliki oleh orang saja tetapi juga menggunakan nilai mental dan spiritual. Dengan demikian, dapat memberikan pendalaman yang lebih mengenai Nilai Tambah Syariah. Hasilnya adalah dengan menggunakan konsep nilai tambah syariah akan memberikan kesadaran dalam mencari rezeki yang halal, dan bebas dari riba'. Dengan menggunakan konsep nilai tambah syariah maka memberikan kesadaran untuk menjauh dari nilai-nilai kapitalis. Nilai Tambah Syariah di dalam praktiknya masih tidak bisa diterapkan karena konsep nilai tambah syariah masih dalam konsep. Konsep ini bisa diterapkan jika standar akuntansi yang ada di Indonesia harus di ubah secara bertahap sehingga akan mendapatkan standar akuntansi yang sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Dalam penyusunan laporan keuangan

syariah tidak bisa terlalu melompat jauh karena dengan perbedaan yang terlalu mencolok dapat memberikan banyak pertanyaan tentang perubahan-perubahan yang timbul dalam pembuatan standar-standar baru dalam penyusunan laporan keuangan syariah.

Kata Kunci: Konsep Nilai Tambah Syariah, Konsep Laba Rugi, Laporan Nilai tambah Syariah

Tias Iftitah

Departement of Accounting, Faculty of Economics, University of Jember

ABSTRACT

The concept of value-added Shariah is a concept that is done to provide benefits not only provide benefits to stakeholders but also provide justice to the people and provide value submission to God Almighty obtained lawfully and free from riba '. Value Added Sharia can provide a great impact to the stackholder or shareholders because by using this concept can be distanced from the values of selfish self. With the value of submission and justice can provide benefits such as increase in self honesty, social value and improve the spiritual levels in a person. The process of this study aims to determine the development of sharia added value in society in accordance with the existing reality, and in line with the teachings of Islam brought by the Prophet Muhammad. Using phenomenology is not only used in the sense of thinking or owned by a person, but also uses mental and spiritual values. Thus, it can provide a more deepening of the Value Added Sharia. The result is to use the concept of value-added Shariah will bring awareness in the search for sustenance is halal and free from riba '. Is by using the concept of value-added Shariah then give awareness to move away from the values of the capitalist. Value Added Sharia in practice they can not be applied because the concept of value-added Shariah is still in the concept. This concept can be applied if the accounting standards in Indonesia should be changed gradually so that it will get the accounting standards in accordance with the provisions of Islamic

Sharia. In preparing the financial statements sharia can not be too jump away due to striking differences too can give a lot of questions about the changes that arise in the manufacture of new standards in the preparation of financial statements sharia.

Keywords: *Shariah Value Added Statement, Income Statement, Shariah Value Added Report*

RINGKASAN

Konstruksi Nilai Tambah Syariah pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk; Tias Iftitah, 110810301097; 2016: 100 Halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Konsep nilai tambah merupakan salah satu pemikiran akuntansi syariah yang dianggap sesuai dengan karakter muamalah *syariah*. Berbeda dengan konsep laba, konsep nilai tambah tidak hanya difokuskan pada ekuitas-modal tetapi mengarah pada kepentingan lebih luas dalam bentuk distribusi pada seluruh *stakeholders* sebagaimana digagas dalam konsep *Shari'ah Enterprise Theory* (SET). Dengan perhatian seperti ini, konsep nilai tambah dianggap memberikan perspektif yang berbeda dengan perspektif yang selama ini melekat pada konsep laba, yaitu egois dan *stockholders oriented*. Lebih jauh Triyuwono (2007) menyarankan diaplikasikannya laporan nilai tambah sebagai bagian *mandatory report* dalam laporan akuntansi suatu entitas dan menggantikan peran laporan laba rugi, karena hal ini adalah konsekuensi diadopsinya SET sebagai dasar pengembangan teori akuntansi syari'ah (Triyuwono 2007). Triyuwono (2007) mengatakan bahwa laporan nilai tambah syariah bukanlah modifikasi atau konversi dari laporan laba-rugi dan akan berdiri sendiri untuk menggantikan

laporan laba-rugi. Mulawarman (2009) mengatakan bahwa konsep nilai tambah syariah merupakan hasil dekonstruksi dari konsep nilai tambah dari domain akuntansi konvensional. Peneliti memahami bahwa konsep laporan nilai tambah tidak sama sekali berbeda dengan laporan laba-rugi konvensional.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang dikategorikan dalam studi kepustakaan. Studi pustaka adalah pengumpulan data dengan cara mempelajari dan memahami buku-buku yang mempunyai hubungan dengan *shariah enterprise theory*, *value added statement*, bank syariah seperti dari literatur, jurnal-jurnal, media massa dan hasil penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber, baik dari perpustakaan dan sumber lain.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya hasil penelitian menunjukkan bahwa Konsep *shariah value added statement* sebagai pengganti laporan laba rugi lebih menyajikan informasi kinerja yang lebih luas, komprehensif dan mendekati nilai keadilan. Apabila menggunakan laporan laba rugi, laba hanya berorientasi pada pemegang saham saja. Adanya laporan nilai tambah, telah memberikan informasi yang lebih jelas bagi pemakai laporan keuangan. Laporan nilai tambah tidak hanya memberikan informasi yang berkaitan dengan keputusan ekonomi yaitu laba, tetapi juga informasi yang berkaitan dengan kewajiban zakat yang harus dibayarkan oleh perusahaan, informasi tentang besarnya gaji bagi karyawan dan informasi seputar hak bagi hasil bagi pihak ketiga. Tanggung jawab Bank Syariah Mandiri kepada *stakeholders* melalui perhitungan distribusi nilai tambah menyatakan BSM bukanlah sebuah institusi yang bersifat *shareholder oriented*, dimana perusahaan hanya memiliki kepedulian dan tanggung jawab terhadap pemegang saham. Dengan adanya laporan nilai tambah terlihat distribusi nilai tambah perusahaan selama ini kepada para *stakeholder*. Melalui konsep nilai tambah, BSM ternyata memiliki kepedulian yang sangat besar kepada *stakeholders* secara luas, yaitu Tuhan, manusia, dan alam. Selain itu

membuktikan bahwa melalui konsep nilai tambah, BSM telah mampu memperlihatkan jika perbankan syariah telah menjalankan amanah yaitu sebagai *khalifatullah fil ardh* yang diimplikasikan melalui pembayaran zakat dan penerapan *caelestial management* untuk meningkatkan kualitas sumber daya insani yang merupakan bagian dari pengabdian kepada Allah.



SUMMARY

Construction of Shariah Value Added Statement in Bank Syariah Mandiri, Tbk; Tias Iftitah, 130810301148; 2016: 100 Page: Department of Accounting, Faculty of Economics, University of Jember.

The concept of value added is one of the Islamic accounting thoughts that are considered in accordance with Shariah muamalah character. In contrast to the concept of profit, the concept of value added is not only focused on equity-capital but leads to a wider interest in the form of distribution on all stakeholders as it was conceived in the concept of Shari'ah Enterprise Theory (SET). With this kind of attention, the concept of value added is considered to provide a different perspective with the perspective that has been attached to the concept of profit, that is selfish and stockholders oriented. Further Triyuwono (2007) diaplikasikannya report suggests value added as part of the mandatory report in a report accounting for an entity and replaces the role of the income statement, because this is a consequence of the adoption of the theory as the basis for the development of SETS of accounting of Shariah (Triyuwono 2007). Triyuwono (2007) said that the Shariah is not value added reports modification or conversion of the laba-rugi report and will stand on its own to replace the laba-rugi report. Mulawarman (2009) said that the concept of value added of Sharia is the result of the deconstruction of the concept of value added from the conventional accounting domain. The researchers acknowledge that the concept of value added reports not at all different from the conventional laba-rugi report.

This research uses qualitative research methods are categorized in the study of librarianship. Study of the library is the collection of data by means of studying

and understanding the books that relates to shariah enterprise theory, value added statement, Islamic banks as from literature, journals, news media and research results are obtained from various sources, both from libraries and other sources.

Based on the results of the analysis that has been done on this research, it can be drawn the conclusion that the results showed that the shariah concept of value added statement in lieu of income statements more serves a broader performance information, comprehensive and approaching the value of Justice. When using income statement, profit-oriented only on shareholders only. The existence of reports on value added, has given a clearer information for users of financial statements. The report not only provides value-added information berkaitan with the economic decisions that is profit, but also information relating to the obligation of zakat payable by the company, information about the magnitude of the salary for employees and information about rights for the results to a third party. Bank Syariah Mandiri responsibilities to stakeholders through the calculation of the distribution of value added BSM stated is not an institution that is shareholder oriented, where the firm has only concern and responsibility towards shareholders. With the report the value added value added distribution companies look for these stakeholders. Through the concept of value added, the BSM turns out to have a very big concern to stakeholders broadly, i.e. God, man, and nature. Besides proving that through the concept of added value, BSM has been able to exhibit if Islamic banking has been running a mandate as the khalifatullah fil ardh. implied through the payment of zakat and application caelestial management to improve the quality of human resources is part of devotion to God.

PRAKATA

Bismillahirrahmannirrahim,

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya, serta memberikan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Konstruksi Laporan Nilai Tambah Syariah pada PT. Bank Syariah Mandiri,Tbk**”. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah SAW.

Penyusunan skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan semua pihak, baik itu berupa dorongan, nasehat, saran maupun kritik yang sangat membantu. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Moehammad Fathorrazi., S.E., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
2. Bapak Dr. Muhammad Miqdad, S.E, MM, Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
3. Bapak Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E, M.Si, Ak selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, kritik, dan pengarahan dengan penuh kesabaran dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. Achmad Roziq, SE, M.Si, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahnya dalam penulisan & penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen beserta Staf Karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Jember serta pihak – pihak kampus Universitas Jember

yang telah bersedia memberikan waktunya untuk membagikan ilmu yang dimiliki.

6. Orang-orang terkasih, Ayahanda Slamet Musthofa, S.Pd.I dan Ibunda Sri Sakti SH, Adik tercinta Agis Fatahillah, dan Mas Galuh Irawan. Terima kasih banyak atas cinta, kasih sayang, do'a, dan dukungan semangat yang tidak pernah putus.
7. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT selalu memberikan Hidayah dan Rahmat kepada semua pihak yang telah membantu dengan ikhlas sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis sadar akan keterbatasan dan kurang sempurnanya penulisan skripsi ini, oleh karena itu segala saran dan kritik yang bersifat membangun akan sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan bagi yang membacanya.

Alhamdulillahilabbilamin

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Jember, Februari 2016

Penulis

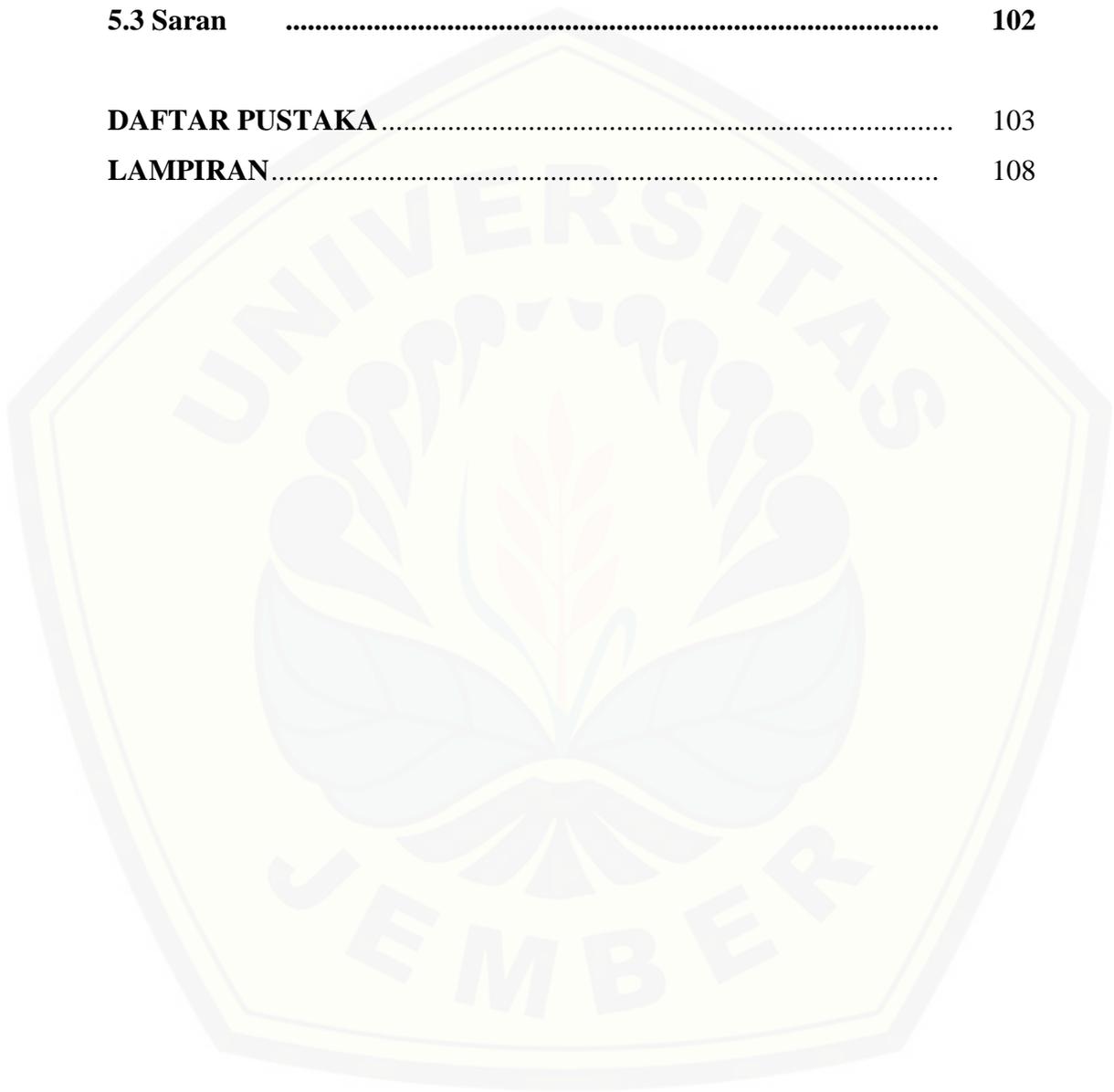
DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERNYATAAN	vii
HALAMAN PEMBIMBINGAN	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
RINGKASAN	xi
SUMMARY	xiii
PRAKATA	xv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Pengertian Prinsip Syariah	10

2.1.2 Landasan Syariah.....	10
2.1.3 Konsep <i>Income</i>	11
2.1.4 Konsep Ekuitas.....	12
2.1.4.1 <i>Proprietary Theory</i>	13
2.1.4.2 <i>Entity Theory</i>	13
2.1.4.3 <i>Enterprise Theory</i>	15
2.1.5 Konsep Laba.....	18
2.1.5.1 pengertian Konsep Laba Rugi.....	18
2.1.5.2 Pengukuran dan Pelaporan Laba.....	21
2.1.5.3 Jenis – Jenis Laba.....	22
2.1.5.4 Pendistribusian Laba.....	23
2.1.5.5 Distribusi Laba untuk Pemerintah.....	24
2.1.5.6 Distribusi Laba untuk Zakat.....	25
2.1.5.7 Distribusi Laba untuk Pemilik Dana.....	27
2.1.5.8 Distribusi Laba untuk Karyawan.....	27
2.1.5.9 Laba Ditahan.....	29
2.1.6 <i>Shariah Enterprise Theory</i>	30
2.1.7 Metafora Amanah.....	41
2.1.8 Metafora Zakat.....	42
2.1.9 Laporan Nilai Tambah Syariah.....	45
2.1.9.1 Konsep Nilai Tambah Syariah.....	45
2.1.9.2 Keunggulan dan Kelemahan SVAS.....	48
2.1.9.3 Penyusunan dan Penyajian Laporan Nilai Tambah Syariah.....	51
2.1.10 <i>Stakeholder Theory</i>	53
2.2 Bank Syariah	57
2.2.1 Pengertian Bank Syariah.....	57
2.2.2 Laporan Keuangan Bank Syariah.....	58
2.3 Keadilan	62

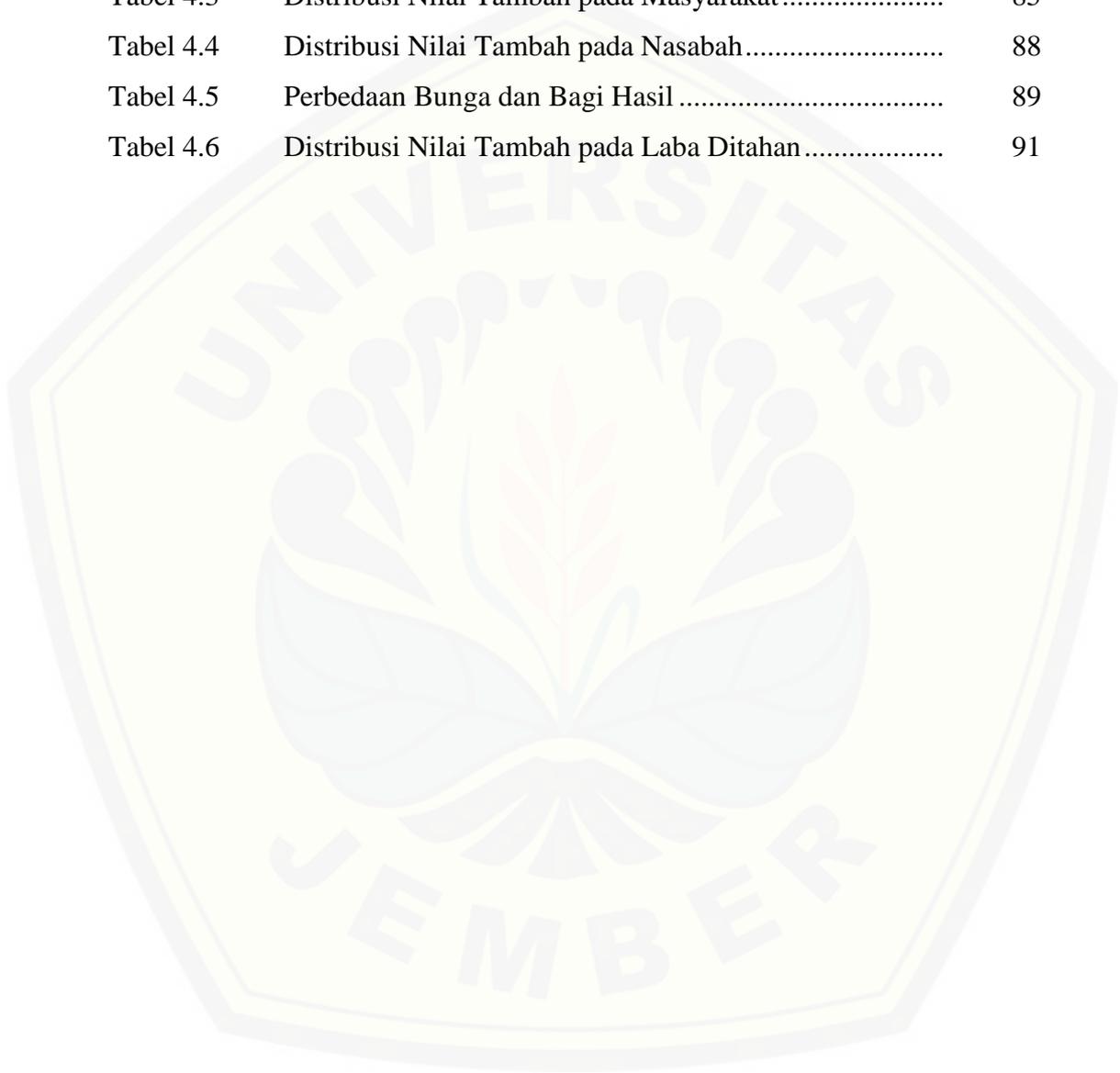
2.3.1 Pengertian Keadilan	62
2.3.2 Nilai Keadilan dalam Akuntansi Syariah.....	63
2.3.3 Keadilan dalam Pendistribusian Laba.....	64
2.4 Penelitian Terdahulu	67
BAB 3 METODE PENELITIAN	45
3.1 Jenis Penelitian	72
3.2 Metode Pengumpulan Data	72
3.3 Jenis dan Sumber Data	73
3.4 Metode Analisis Data	73
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN	74
4.1 Sejarah Singkat PT. Bank Syariah Mandiri	74
4.2 Konsep Pendistribusian Laba dalam Akuntansi Syariah	75
4.3 Penyajian Laporan Nilai Tambah Syariah.....	76
4.3.1 Konsep Perhitungan dan Elemen Laporan Nilai Tambah.....	76
4.3.2 Prosedur Penyusunan Nilai Tambah Syariah.....	78
4.4 Distribusi Nilai Tambah Syariah BSM	80
4.4.1 Distribusi Nilai Tambah Syariah kepada Karyawan.....	80
4.4.2 Distribusi Nilai Tambah Syariah kepada Pemerintah	82
4.4.3 Distribusi Nilai Tambah Syariah kepada Masyarakat.....	84
4.4.4 Distribusi Nilai Tambah Syariah kepada Nasabah.....	87
4.4.5 Distribusi Nilai Tambah Syariah terhadap Laba Ditahan	90
4.4.6 Distribusi Nilai Tambah Syariah kepada Pemilik (Deviden).....	91
4.4.7 Konsep Pendistribusian Laba dalam Akuntansi Syariah	92
4.5 Pembahasan Hasil Penelitian	93
4.5.1 Bentuk Akuntabilitas BSM kepada Tuhan.....	93
4.5.2 Analisis Distribusi Nilai tambah Syariah.....	95
4.5.3 Perbedaan Laporan Laba Rugi dengan Laporan Nilai Tambah Syariah	99

BAB 5 KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN	101
5.1 Kesimpulan	101
5.2 Keterbatasan.....	102
5.3 Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN.....	108



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Distribusi Nilai Tambah pada Karyawan	82
Tabel 4.2 Distribusi Nilai Tambah pada Pemerintah	84
Tabel 4.3 Distribusi Nilai Tambah pada Masyarakat	85
Tabel 4.4 Distribusi Nilai Tambah pada Nasabah	88
Tabel 4.5 Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil	89
Tabel 4.6 Distribusi Nilai Tambah pada Laba Ditahan	91



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Laporan Laba Rugi Tahun 2012
- Lampiran 2 Laporan Nilai Tambah Syariah Tahun 2012
- Lampiran 3 Laporan Laba Rugi Tahun 2013
- Lampiran 4 Laporan Nilai Tambah Syariah Tahun 2013
- Lampiran 5 Laporan Laba Rugi Tahun 2014
- Lampiran 6 Laporan Nilai Tambah Syariah Tahun 2014
- Lampiran 7 Catatan Atas Laporan Keuangan



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konsep nilai tambah merupakan salah satu pemikiran akuntansi syariah yang dianggap sesuai dengan karakter muamalah *syariah*. Berbeda dengan konsep laba, konsep nilai tambah tidak hanya difokuskan pada ekuitas-modal tetapi mengarah pada kepentingan lebih luas dalam bentuk distribusi pada seluruh *stakeholders* sebagaimana digagas dalam konsep *Shari'ah Enterprise Theory* (SET). Dengan perhatian seperti ini, konsep nilai tambah dianggap memberikan perspektif yang berbeda dengan perspektif yang selama ini melekat pada konsep laba, yaitu egois dan *stockholders oriented*. Lebih jauh Triyuwono (2007) menyarankan diaplikasikannya laporan nilai tambah sebagai bagian *mandatory report* dalam laporan akuntansi suatu entitas dan menggantikan peran laporan laba rugi, karena hal ini adalah konsekuensi diadopsinya SET sebagai dasar pengembangan teori akuntansi syari'ah (Triyuwono 2007).

Triyuwono (2007) mengatakan bahwa laporan nilai tambah syariah bukanlah modifikasi atau konversi dari laporan laba-rugi dan akan berdiri sendiri untuk menggantikan laporan laba-rugi. Mulawarman (2009) mengatakan bahwa konsep nilai tambah syariah merupakan hasil dekonstruksi dari konsep nilai tambah dari domain akuntansi konvensional. Peneliti memahami bahwa konsep laporan nilai tambah tidak sama sekali berbeda dengan laporan laba-rugi konvensional. Hal serupa juga diungkapkan oleh Belkaoui (1999) yang mengatakan bahwa,

The value added statement may be conceived as a modified version of the income statement. Consequently, it can be derived from the income statement.

Menurut Godfrey, Hodgson (2010) *entity theory* dirumuskan dalam menanggapi kekurangan dari *proprietary theory* yang memiliki status hukum yang terpisah dari sebuah perusahaan. Teori ini didasarkan pada fakta bahwa

perusahaan merupakan entitas yang terpisah dengan identitas sendiri. Teori ini melampaui 'asumsi entitas akuntansi' tentang pemisahan bisnis dan urusan pribadi, dan bertanggung jawab terhadap *shareholders*. Akibatnya, informasi yang disajikan akuntansi modern berbau egoistik. Selanjutnya, sifat egoistik merasuk ke dalam cara pikiran dan pengambilan keputusan para penggunanya. Pengguna menjadi egois dan realitas yang diciptakan juga menjadi egois karena hanya berfokus kepada profit dan profit, tanpa memperhatikan pihak lain.

Entity theory dianggap kurang sesuai dengan tujuan yang dimiliki oleh bisnis islam, maka yang dianggap mewakili adalah *enterprise theory* yang lebih baik dari *entity theory*, karena memiliki nilai egoisme yang jauh lebih rendah dan menunjukkan bahwa kekuasaan ekonomi tidak lagi berada dalam satu tangan yaitu *shareholders* tetapi juga *stakeholders* seperti, pelanggan, kreditor, manajemen, pemasok, pemerintah. Seperti yang di katakan Harahap (1997) dalam Triyuwono (2006) bahwa *enterprise theory* lebih lengkap dibandingkan dengan teori yang lain karena melingkupi aspek sosial dan pertanggungjawaban.

Dapat disimpulkan bahwa dari ketiga teori tersebut, *enterprise theory* yang berorientasi terhadap aspek sosial dan pertanggungjawaban. Namun, *enterprise theory* dianggap belum dapat menampung aspek pertanggungjawaban dan ketundukan terhadap syariah. Oleh karena itu, Triyuwono (2006) mengajukan konsep *shariah enterprise theory* yang dikembangkan berdasarkan metafora zakat yang pada dasarnya memiliki karakter keseimbangan. Secara umum, nilai keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan antara nilai-nilai maskulin dan nilai-nilai feminin. *Shariah enterprise theory* menyeimbangkan nilai egoistik (maskulin) dengan nilai altruistik (feminin), nilai materi (maskulin) dengan nilai spiritual (feminin), dan seterusnya.

Dalam syari'ah islam, bentuk keseimbangan tersebut secara konkrit diwujudkan dalam salah satu bentuk ibadah, yaitu zakat. Zakat yang kemudian dimetaforakan menjadi "metafora zakat" secara implisit mengandung nilai

egoistik- altruistik, materi-spiritual, dan individu-jama'ah (Triyuwono, 2006). Dijelaskan juga bahwa *stakeholders* dalam *shariah enterprise theory* ada tiga yaitu Tuhan yang merupakan pusat dari segala sesuatu di dunia untuk menjadi tempat kembalinya manusia dan alam semesta, manusia yang diciptakan Tuhan sebagai wakilnya di bumi (*khalifatullah fil Ardh*), dan alam merupakan pihak yang memberikan kontribusi bagi mati-hidupnya perusahaan sebagaimana pihak Tuhan dan manusia.

Menurut akuntansi syariah idealis, digunakannya *syariah enterprise theory* sebagai konsep dasar teoritis berdampak pada pencatatan transaksi dan akuntabilitas laporan. Pencatatan transaksi dan akuntabilitas laporan harus memiliki keseimbangan akuntabilitas finansial-sosial-lingkungan dan materi-batin-spiritual, memenuhi prinsip *halal thoyib*, dan bebas *riba*, serta menggunakan beberapa laporan keuangan kuantitatif maupun kualitatif bersifat *mandatory* (Mulawarman, 2009). *Shariah enterprise theory* memiliki cakupan akuntabilitas yang lebih luas dibandingkan dengan *enterprise theory*. Bentuk akuntabilitas semacam ini berfungsi sebagai tali pengikat agar akuntansi syariah selalu terhubung dengan nilai-nilai yang dapat membangkitkan kesadaran ke-Tuhanan. Konsekuensi dari diterimanya *shariah enterprise theory* sebagai dasar dari pengembangan teori akuntansi syariah adalah pengakuan *income* dalam bentuk nilai tambah (*value-added*), bukan *income* dalam pengertian laba (*profit*) sebagaimana yang diadopsi *enterprise theory* (Triyuwono, 2006).

Konsep nilai tambah merupakan salah satu pemikiran akuntansi syariah yang dianggap sesuai dengan karakter muamalah *syariah*. Berbeda dengan konsep laba, konsep nilai tambah tidak hanya difokuskan pada ekuitas-modal tetapi mengarah pada kepentingan lebih luas dalam bentuk distribusi pada seluruh *stakeholders* sebagaimana digagas dalam konsep *Shari'ah Enterprise Theory* (SET). Dengan perhatian seperti ini, konsep nilai tambah dianggap memberikan perspektif yang berbeda dengan perspektif yang selama ini melekat

pada konsep laba, yaitu egois dan *stockholders oriented*. Lebih jauh Triyuwono (2007) menyarankan diaplikasikannya laporan nilai tambah sebagai bagian *mandatory report* dalam laporan akuntansi suatu entitas dan menggantikan peran laporan laba rugi, karena hal ini adalah konsekuensi diadopsinya SET sebagai dasar pengembangan teori akuntansi syari'ah (Triyuwono 2007).

Triyuwono (2007) mengatakan bahwa laporan nilai tambah syariah bukanlah modifikasi atau konversi dari laporan laba-rugi dan akan berdiri sendiri untuk menggantikan laporan laba-rugi. Lebih lanjut Triwuyono menjelaskan bahwa nilai tambah muncul karena adanya selisih lebih dari harga jual produk yang terjual dengan *costs* masukan yang terdiri dari bahan baku dan jasa yang dibutuhkan. Triwuyono juga mengatakan bahwa *Value-Added Income* diibaratkan sebagai kue yang sedemikian rupa harus didistribusikan kepada masyarakat. Konsep ini lebih menekankan pada distribusi nilai tambah yang diciptakan kepada mereka yang berhak menerimanya. Sementara dari sisi lain, Triyuwono berpandangan bahwa pengertian tersebut di atas adalah sebatas nilai tambah ekonomi. Lebih khusus pada bidang kajian akuntansi syari'ah, Triyuwono (2007) menjelaskan bahwa nilai tambah syari'ah adalah nilai tambah ekonomi, mental, dan spiritual yang diperoleh, diproses, dan didistribusikan dengan cara yang halal.

Kaitannya dengan pemenuhan akuntabilitas laporan keuangan bank syariah, seorang pakar akuntansi syariah merekomendasikan laporan nilai tambah (*value added statement*), sebagai tambahan dalam laporan keuangan bank syariah (Baydoun dan Willet, 2000). Laporan nilai tambah menurut Baydoun dan Willet (2000) merupakan laporan keuangan yang lebih menekankan prinsip *full disclosure* dan didorong akan kesadaran moral dan etika karena prinsip *full disclosure* merupakan cerminan kepekaan manajemen terhadap proses aktivitas bisnis terhadap pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Kepekaan itu terwujud berupa penyajian informasi akuntansi melalui distribusi pendapatan

secara lebih adil. Adanya laporan nilai tambah telah mengganti *mainstream* tujuan akuntansi dari *decision making* bergeser kepada pertanggungjawaban sosial.

Dengan demikian, laporan nilai tambah syariah (*shariah value added statement*) sebagai laporan keuangan tambahan dalam laporan keuangan bank syariah perlu di ketahui bagaimana pertanggungjawabannya kepada *stakeholders*. Karena laporan laba rugi merupakan laporan yang lebih memperhatikan kepentingan *direct stakeholders* (pemilik modal), berupa pencapaian profit yang maksimal, dengan mengesampingkan kepentingan dari pihak lain (karyawan, masyarakat, sosial dan pemerintah), sehingga profit yang diperoleh distribusinya hanya sebatas kepada *direct stakeholders* (pemilik modal) saja. Sementara dengan adanya *value added statement* sebagai laporan keuangan tambahan maka kemampuan bank syariah dalam menghasilkan profitabilitas dihitung dengan juga memperhatikan kontribusi pihak lain seperti karyawan, masyarakat, pemerintah dan lingkungan. Sehingga profit yang diperoleh dalam distribusinya tidak hanya sebatas pada *direct stakeholders* saja melainkan juga kepada *indirect stakeholders*.

Konsep *value added statement* telah lama dikenal dalam penelitian akuntansi sebagai salah satu alternatif penyajian laba. Jika ditinjau dari konsep pendistribusian laba bersih terhadap unsur-unsur penciptaan laba, *value added statement* memang lebih bermakna manusiawi dan mengandung nilai-nilai keadilan. Tetapi dalam kenyataannya perusahaan tidak selalu berhasil meraih laba. Apalagi dalam kondisi krisis ekonomi, banyak perusahaan yang menderita kerugian, bahkan mencapai tingkat yang cukup parah.

Di dalam sistem ekonomi Islam, terutama yang berkaitan dengan pola kerja sama usaha dalam bentuk syirkah, diatur tentang bagaimana hasil usaha (laba bersih) perusahaan didistribusikan kepada pihak-pihak yang bekerja. Permasalahan distribusi ini telah diatur oleh hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan masalah kepemilikan, perolehan harta, pengelolaan harta, pengembangan

harta, mata uang, jual beli dan distribusi kekayaan.

Lebih lanjut lagi dalam syirkah juga diatur tentang hak-hak dan kewajiban pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan serta hubungan perusahaan dengan pihak-pihak tersebut. Khususnya yang berkaitan dengan konsep pendistribusian laba, secara mendasar aturan didalam syirkah mengandung prinsip bahwa pendekatan pendistribusi laba juga mempertimbangkan kemungkinan kerugian yang akan dialami oleh perusahaan. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari pola kerjasama di dalam perusahaan terutama terhadap apa yang diinvestasikan pada perusahaan, hak untuk memperoleh bagian laba, sekaligus kesediaan untuk menanggung resiko dari investasi tersebut. Maka prinsip keadilan akan lebih dapat diciptakan dalam penerapan akuntansi syariah, sesuai dengan salah satu prinsip dasar dalam ekonomi Islam menurut Ibnu Al-A'rabi yang dikutip Nurhayati (2009, 100) yaitu tidak boleh melakukan transaksi syariah secara tidak adil.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Konstruksi Laporan Nilai Tambah Syariah pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan dalam bentuk pertanyaan yaitu :

1. Bagaimana penerapan konsep *shariah value added statement* sebagai alternatif pengganti laporan laba rugi dalam pelaporan keuangan perbankan syariah ?
2. Bagaimanakah kinerja perbankan syariah sebelum dan sesudah menggunakan konsep *shariah value added statement* dalam mendistribusikan nilai tambah kepada *stakeholders*?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Memberikan gambaran tentang penerapan konsep *shariah value added statement* sebagai alternatif pengganti laporan laba rugi dalam pelaporan keuangan Bank Syariah yang dinilai lebih mencerminkan aspek keadilan
2. Melakukan analisis terhadap pendistribusian nilai tambah yang dihasilkan Bank Syariah sebelum dan sesudah menggunakan *shariah value added statement*.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terbagi menjadi dua, manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan utama dalam pengembangan konsep atau teori dalam perkembangan ilmu pengetahuan akuntansi syariah, khususnya yang terkait dengan pelaporan keuangan akuntansi syariah.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Untuk menambah ilmu dan wawasan tentang pengembangan akuntansi syariah, serta memberikan kontribusi positif dalam dunia pemikiran akuntansi syariah.

b. Perusahaan

Dapat dijadikan sebagai bahan masukan tentang pentingnya menambahkan Laporan Nilai Tambah dalam elemen laporan keuangan yang diterbitkan.

c. Masyarakat Umum

Dapat menambah khasanah keilmuan dan referensi yang dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk mengetahui kinerja keuangan perbankan syariah.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN. Bab pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. Bab ini adalah gambaran awal dari apa yang akan dilakukan peneliti.

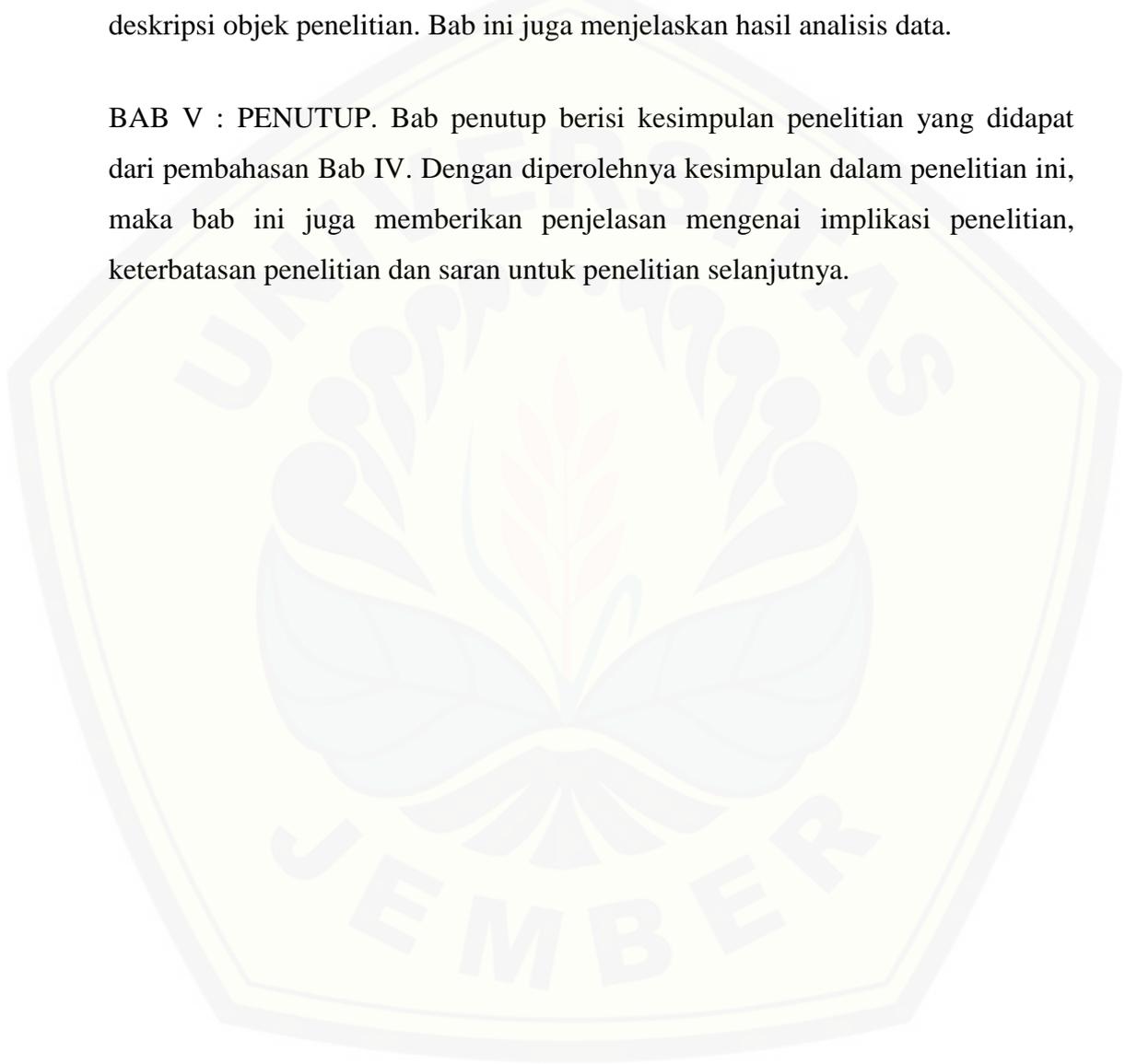
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA. Bab tinjauan pustaka membahas mengenai teori-teori yang melandasi penelitian ini dan menjadi dasar acuan teori yang digunakan dalam analisis penelitian ini. Selain itu, bab ini juga menjelaskan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dengan landasan teori dan penelitian terdahulu, maka dapat dibuat kerangka pemikiran dan juga menjadi dasar dalam pembentukan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN. Bab metode penelitian menjelaskan variabel penelitian dan definisi operasional dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian. Selain itu, bab ini juga menjelaskan populasi dan penentuan

sampel, jenis dan sumber data, serta metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian. Selanjutnya, menerangkan metode analisis yang digunakan untuk menganalisis hasil pengujian data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN. Bab hasil dan pembahasan menjelaskan deskripsi objek penelitian. Bab ini juga menjelaskan hasil analisis data.

BAB V : PENUTUP. Bab penutup berisi kesimpulan penelitian yang didapat dari pembahasan Bab IV. Dengan diperolehnya kesimpulan dalam penelitian ini, maka bab ini juga memberikan penjelasan mengenai implikasi penelitian, keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pengertian Prinsip Syariah

Menurut Karim (2006), secara terminologi definisi syariah adalah peraturan-peraturan dan hukum yang telah digariskan oleh Allah, atau telah digariskan pokok-pokoknya dan dibebankan pada kaum muslimin supaya mematuhi, supaya syariah ini diambil oleh orang Islam sebagai penghubung diantaranya dengan Allah dan diantaranya dengan manusia.

Singkatnya, syariah itu berisi peraturan dan hukum-hukum, yang menentukan garis hidup yang harus dilalui oleh kaum muslimin. Dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dijelaskan bahwa prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan data dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

2.1.2. Landasan Syariah

Landasan syariah sebagaimana tersirat didalam Al Qur'an adalah sebagai berikut:

1. Surat *Ar Ruum* : Ayat 39, artinya :

“Dan suatu Riba yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah.....”

Dapat dijelaskan dari surat *Ar Ruum*, bahwa Allah melarang riba karena riba hanya menambahkan pada harta duniawi, sedangkan tidak akan menambah (pahala) di sisi Allah.

2. Surat *Ali Imran* : Ayat 130, artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keuntungan.”

Surat *Ali Imran* ini menjelaskan bahwa Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk menghindari Riba yang mengambil untung berlipat ganda, dan Allah memerintahkan manusia agar bertaqwa dan mengikuti syariat Islam agar mendapat keuntungan (Pahala/Surga)

3. *Al Baqarah* : Ayat 275, artinya :

“ Orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Surat ini menerangkan bahwa dengan menerapkan riba, maka digambarkan bahwa manusia seperti orang yang sudah dikuasai setan, dan Allah telah berfirman bahwa Ia menghalalkan jual beli yang sesuai dengan syariat Islam, dan mengharamkan riba’.

2.1.3. Konsep Income dalam Arti Nilai Tambah Syariah

Mengutip penjelasan Suojanen (1954) yang mengatakan bahwa memahami enterprise theory sama dengan mendefinisikan perusahaan sebagai pusat pengambilan keputusan bagi para partisipan. Perusahaan dipandang sebagai bagian komunitas sosial. Oleh karena itu, Suojanen (1954) mengusulkan konsep nilai tambah sebagai konsep pengukuran income. Hal yang senada juga

diungkapkan Suwarjono (2005) dalam lingkup konvensional dan Triyuwono (2007) dalam lingkup akuntansi syari'ah menganggap bahwa adopsi Shari'ah Enterprise Theory (SET) sebagai teori dasar akuntansi syari'ah menimbulkan konsekuensi penggunaan konsep income dalam arti nilai tambah sebagai pengganti konsep laba. Para ahli akuntansi mendefinisikan nilai tambah dengan makna yang beragam, tetapi apabila diperhatikan sebenarnya semua saling melengkapi dan menguatkan. Belkaoui (1999,2) mengutip dari Accounting Standards Steering Committee mengatakan bahwa,

The simplest and most immediate way of putting profit into proper perspective vis-avis the whole enterprise as a collective effort by capital, management and employees is by presentation of a statement of value added (that is, sales income less materials and services purchased). Value added (that is, sales income less materials and services purchased) is the wealth the reporting entity has been able to create by its own and its employees' efforts. This statement would show how value added has been used to pay those contributing to its creation. It usefully elaborates on the profit and loss account (Belkaoui : 1999,2)

Sementara itu, Baydoun & Willet; Collins 1994; Wurgler 2000 menjelaskan bahwa nilai tambah tidak lain adalah selisih lebih dari harga jual produk yang terjual dengan costs masukan yang terdiri dari bahan baku dan jasa yang dibutuhkan (Triyuwono:2007). Ia juga mengutip pendapat Hendriksen (1982) yang mengatakan bahwa Value-Added Income diibaratkan sebagai kue yang sedemikian rupa harus didistribusikan kepada masyarakat. Konsep ini lebih menekankan pada distribusi nilai tambah yang diciptakan kepada mereka yang berhak menerimanya (Triyuwono:2006). Triyuwono berpandangan bahwa pengertian tersebut di atas adalah sebatas nilai tambah ekonomi. Sedangkan lebih khusus pada bidang kajian akuntansi syari'ah, Triyuwono (2007) menjelaskan

bahwa nilai tambah syari'ah adalah nilai tambah ekonomi, mental, dan spiritual yang diperoleh, diproses, dan didistribusikan dengan cara yang halal.

2.1.4. Konsep Ekuitas

2.1.4.1. *Proprietary Theory*

Konsep proprietary theory menempatkan pemilik sebagai pusat segala kepentingan yang mengarah pada konsekuensi legitimasi dan stimulasi perilaku egoistis, serta individual dalam perilaku bisnis. Secara implisit konsep proprietary theory mengekspresikan suatu hierarki kekuasaan atas kekayaan secara terpusat, bahkan berpotensi totaliter dan mengarah pada replika perang sosial, dimana wujud kompetensi secara interaktif meningkatkan intensitas dorongan mencari kekayaan (Setiabudi dan Triyuwono 2002, dalam Mulawarman 2009).

Teori ini merupakan teori akuntansi yang paling kuno dan banyak konsep akuntansi yang dikembangkan dari teori ini Kam (1990). Perkembangan perusahaan-perusahaan yang makin besar dan dipengaruhi oleh lingkungan industri yang sangat cepat, di mana juga diikuti oleh perkembangan pasar uang dan konsekuensi dari reliabilitas informasi akuntansi, mengakibatkan pendekatan *proprietary theory* menjadi tidak sesuai lagi. Muncullah kemudian konsep *entity theory*, yang mengarahkan pusat perhatiannya pada unit ekonomi, pembedaan dan pemisahan kepemilikan.

2.1.4.2. *Entity Theory*

Ide utama dari entity theory adalah memahami perusahaan sebagai entitas yang terpisah dari pemiliknya. Teori ini muncul dengan maksud mengurangi kelemahan-kelemahan yang ada pada proprietary theory di mana proprietor (pemilik) menjadi pusat perhatian Kam (1990,302). Unit usaha menjadi pusat perhatian yang harus dilayani, bukannya pemilik. Entitas dikonsepsikan memiliki

eksistensi terpisah Belkaoui (2006). Menurut Paton yang dikutip Kam (1990) :

It is the "business" whose financial history the bookkeeper and accountant are trying to record and analyze; the books and accounts are the record of the business"; the periodic statements of operation and financial condition of operations and financial condition are the reports of "the business.

Konsep *entity theory* merupakan evolusi dari konsep *proprietary theory*, namun bila diinterpretasikan secara kritis (khususnya dalam konsep kepemilikan), sebagian besar muatannya tetap berbasiskan aspek-aspek ideologis yang sama dengan konsep *proprietary theory*. *Entity theory* memiliki kepentingan yaitu informasi akuntansi sebesar-besarnya untuk pemilik modal, agar dapat mengetahui dan mempertahankan modal yang ditanam (*capital maintenance*) sekaligus mendapatkan laba yang maksimal.

Baik implisit atau eksplisit, dalam *entity theory* terlihat adanya *principal-agent relationship*, yaitu hubungan antara pemilik (*shareholders*) dan agent (*management*) yang dalam *mainstream accounting* dianggap konsep yang objektif dan netral (bebas nilai), tapi sebaliknya sarat dengan nilai kapitalisme yang dalam faktanya sangat eksploitatif Triyuwono (2006).

Triyuwono dalam Mulawarman (2009) menjelaskan bahwa sebenarnya model bisnis kontemporer sekarang ini sangat berbeda dengan model bisnis masa lalu. Artinya, keberlangsungan hidup perusahaan tidak lagi ditentukan sendiri oleh pemilik, tetapi banyak sekali dipengaruhi oleh banyak pihak seperti pelanggan, kreditur, manajemen, pegawai, pemasok, pemerintah dan lain-lain (*stakeholders*) yang juga sama-sama memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Oleh karena itu menurut Triyuwono (2006), kedua teori tersebut tidak akan mampu mewartakan kemajemukan *stakeholders* dan percepatan bisnis yang ada

saat ini, dan untuk mengatasi hal ini diperlukan alternatif yang tepat, yaitu *enterprise theory*

2.1.4.3. Enterprise Theory

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa proprietary theory dan entity theory tidak akan mampu mewartakan kemajemukan masyarakat (stakeholders) dan bisnis pada saat ini. Untuk mengatasi hal ini diperlukan wadah alternatif yang lebih tepat dan sesuai dengan lingkungannya. Wadah tersebut, seperti yang disampaikan oleh beberapa penulis (Slamet 2001, Triyuwono 2006) adalah *enterprise theory*. Mengenai *enterprise theory* ini Harahap (1997) dalam Triyuwono (2006) berpendapat bahwa teori tersebut lebih lengkap dibandingkan dengan teori yang lain. Karena ia melingkupi aspek sosial dan pertanggungjawaban. Berbeda dengan *entity theory* yang memusatkan perhatian hanya pada kelompok pemilik sehingga hampir seluruh aktivitas perusahaan diarahkan guna memenuhi kesejahteraan pemilik. *Enterprise theory* dalam hal ini memiliki tidak hanya sifat egois namun juga sudah mulai mengadopsi sifat altruistik. Pendapat serupa diungkapkan juga oleh Triyuwono (2006) yang mengatakan bahwa :

Akuntansi Syariah tidak saja sebagai bentuk akuntabilitas (accountability) manajemen terhadap pemilik perusahaan (stockholders), tetapi juga sebagai akuntabilitas kepada stakeholders dan Tuhan.

Dalam Mulawarman (2009), Suojanen (1954) memformulasikan perusahaan dalam kerangka *enterprise theory*. Perusahaan dipandang sebagai bagian dari komunitas sosial. Institusi dimana keputusan yang dibuat dipengaruhi oleh berbagai kelompok, tidak terbatas pada *shareholders*. *Enterprise theory* melihat bahwa peran akuntansi dalam perusahaan dan entitas pengambilan keputusan adalah membuat laporan untuk didistribusikan pada

berbagai kelompok yang berkepentingan.

Pusat perhatian *enterprise theory* adalah keseluruhan pihak yang terlibat atau memiliki kepentingan baik langsung (*direct*) maupun tidak langsung (*indirect*) dengan perusahaan atau entitas, misal pemilik, manajemen, masyarakat, pemerintah, kreditur, fiskus, regulator, pegawai, langganan dan pihak yang berkepentingan lainnya. Dalam *enterprise theory*, pihak-pihak yang memiliki kepentingan harus diperhatikan dalam penyajian informasi keuangannya, bukan hanya mementingkan informasi bagi pemilik, tetapi juga pihak lainnya yang memberi kontribusi langsung maupun tidak langsung kepada eksistensi perusahaan atau lembaga (Harahap:2002, dalam Mulawarman:2009). Semua partisipan menanggung segala aspek kegiatan bersama sehingga mereka disebut secara bersama sebagai *stakeholders* yang terdiri atas manager, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat. Perusahaan berfungsi sebagai alat, pengikat atau pusat (*nexus*) kegiatan.

Pandangan *enterprise theory* dilandasi oleh gagasan bahwa perusahaan berfungsi sebagai institusi sosial yang mempunyai pengaruh ekonomis luas dan kompleks sehingga darinya dituntut pertanggungjawaban sosial. Perusahaan tidak dapat lagi dijalankan untuk kepentingan pemegang saham semata-mata. Walaupun para pemegang saham mempunyai hak yuridis sebagai pemilik, kepentingan para *stakeholders* secara bersama demi berlangsungnya dan kemakmuran perusahaan harus didahulukan.

Tujuan perusahaan menurut konsep *enterprise theory* adalah dalam rangka memberikan kesejahteraan kepada beberapa kelompok orang yang berkepentingan terhadap perusahaan. *Enterprise theory* dengan demikian jelas berbeda dengan *proprietary theory* dan *entity theory*. *Proprietary theory* dan *entity theory* menurut Suojanen (1954) dalam Mulawarman (2009) menekankan laporan laba rugi karena berorientasi pada klain atas *income*. Bahkan, selanjutnya:

The entity theory substitutes the personality of the entity for the personality of the proprietor and thus neatly solves the problem of perpetual succession. The shareholders are, in effect, considered to be no different from other creditors except that their claims appear below the others on the balance sheet.

Enterprise theory lebih luas perhatiannya daripada hanya kepada entitas karena perusahaan sebenarnya berhubungan dengan institusi yang ada di luar dirinya. Perusahaan tidak dapat mencapai tujuan dan bahkan tidak dapat eksis tanpa realitas masyarakat di luarnya. Berdasarkan hal tersebut, *enterprise theory* menurut Soujanen (1954) dalam Mulawarman (2009) lebih mementingkan konsep *value added* untuk pengukuran *income*, sebagai jalan bagi manajemen untuk melaksanakan tugas akuntansi bagi berbagai kelompok kepentingan dengan memberikan informasi yang lebih baik daripada laporan neraca dan laporan laba rugi. *Value added* menurut Soujanen tidak sama dengan produksi *income*.

Enterprise theory seperti dikatakan oleh Meutia (2010) memberikan wadah bagi perilaku perusahaan pada tahun 1950-an yang mulai memperhatikan partisipan lain dalam organisasi selain pemegang saham yaitu pegawai, kreditor, konsumen, pemerintah dan masyarakat. Tipe perilaku seperti ini sulit untuk mendapat tempat dalam konteks teori *entity* maupun *proprietary*.

Konsep *enterprise theory* memang sangat dekat dengan syariah. Namun, dari sudut pandang syariah ia belum mengakui adanya partisipan lain yang secara tidak langsung (*indirect participants*) memberikan kontribusi ekonomi. Artinya, konsep ini belum bisa dijadikan sebuah justifikasi bahwa *enterprise theory* telah menjadi konsep teoritis Akuntansi Syariah sebelum teori tersebut mengakui eksistensi dari *indirect participants*. Secara normatif, *indirect participants* ini mempunyai hak atas nilai tambah yang diciptakan

perusahaan. *Enterprise theory* menurut Slamet (2001) dalam Triyuwono (2006) merupakan teori yang paling pas untuk akuntansi syariah karena mengandung nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, amanah dan pertanggungjawaban. Namun, *enterprise theory* masih bersifat duniawi dan tidak memiliki konsep tauhid. Agar konsep ini sesuai dengan syariah maka perlu diinternalisasi dengan nilai tauhid. Oleh karena itu, Triyuwono (2002) dan Slamet (2001) mengajukan konsep *shariah enterprise theory* dengan jalan memasukkan kepentingan *indirect participants* ke dalam elite kekuasaan ekonomi *direct participants* seperti *shareholders, management, employess, customers, suppliers, governments*, dalam distribusi nilai tambah (*value added*) (Baydoun dan Willet, 1994)

2.1.5. Konsep Laba

2.1.5.1. Pengertian dan Konsep Laba Rugi

Laba merupakan suatu pos dasar dan penting dalam laporan keuangan yang memiliki berbagai kegunaan dalam berbagai konteks. Laba pada umumnya dipandang sebagai suatu dasar bagi perpajakan, penentuan kebijakan pembayaran dividen, pedoman investasi dan pengambilan keputusan dan unsur prediksi kinerja perusahaan (Belkaouli 1997, 330; Harahap 1997, 146 dalam Triyuwono 2001, 1).

Menurut Triyuwono (2001, 9), definisi laba atau profit dalam akuntansi konvensional oleh para akuntan merupakan:

“Kelebihan pendapatan (surplus) dari kegiatan usaha, yang dihasilkan dengan mengaitkan (matching) antara pendapatan (revenue) dengan beban terkait dalam suatu periode yang bersangkutan (biasanya dalam waktu tahunan)”

Selanjutnya laba ditentukan setelah proses tersebut terjadi. Proses pengkaitan (*matching*) menyebabkan timbulnya kewajiban untuk mengalokasikan beban yang belum teralokasikan ke dalam neraca. Beban-beban yang belum teralokasikan (aktiva non-moneter) bersama-sama dengan aktiva moneter misal kas, persediaan,

dan piutang setelah dikurangkan dengan kewajiban yang timbul menghasilkan sisa yang disebut *accounting capital* atau *residual equity*. Laba akuntansi berhubungan dengan pengukuran modal dan dalam kenyataannya digunakan sebagai analisis terhadap perubahan modal secara temporer.

Perkembangan konsep laba sendiri terus mengalami perubahan, berbagai macam konsep tentang laba bermunculan, diantaranya laba *historical cost*, konsep laba *business income*, konsep laba *replacement cost*, dan sebagainya (Baillie,1995; dalam Triyuwono 2001, 2). Termasuk juga konsep laba dalam akuntansi syariah juga mengikuti perkembangan tersebut.

Konsep laba dalam struktur teori akuntansi dapat diketahui dengan menggunakan pendekatan sintaksis, semantis, dan pragmatis. Konsep laba secara sintaksis yaitu melalui aturan-aturan yang mendefinisikannya; secara semantis yaitu melalui hubungan pada realitas ekonomi yang mendasari; dan secara pragmatis yaitu melalui penggunaannya oleh investor tanpa memperhatikan bagaimana hal itu diukur dan tahu apa artinya (Hendriksen dan Van Breda 2000; 329 dalam Triyuwono 2001; 8).

Ada perbedaan mendasar tentang cara pandang antara masyarakat muslim dan masyarakat kapitalis terhadap perolehan laba. Menurut Muhammad (2002;273), dalam masyarakat kapitalis tujuan utama sebuah organisasi atau perusahaan didirikan adalah untuk memaksimalkan laba dari investasi yang dilakukan untuk perusahaan atau organisasi tersebut. Jika tujuan utamanya hanya ingin mendapatkan laba yang besar, ada beberapa efek dari paradigma tersebut diantaranya:

1. Masyarakat kapitalis akan sangat mementingkan kepentingan individu daripada kepentingan orang banyak.
2. Sistem ekonomi yang berbasis kapitalis menyebabkan terpusatnya ekonomi di tangan sekelompok kecil individu yang menikmati pendapatan tinggi, memegang kendali segala urusan dan memungkinkan segalanya terjadi untuk kepentingannya. Akibatnya terjadi ketimpangan yang

mencolok antara si kaya dan miskin.

Laba bukanlah tujuan yang paling utama dalam pendirian suatu perusahaan atau organisasi. Tetapi bukan berarti perusahaan tersebut tidak boleh mendapatkan laba, hanya saja laba yang diperoleh harus halal dan sesuai dengan prinsip syari'at Islam.

Ada dua konsep Islam yang sangat berkaitan dengan pembahasan masalah laba, yaitu adanya mekanisme pembayaran zakat dan sistem tanpa bunga (Hameed, 2000; dalam Triyuwono, 2001; 2). Zakat pada prinsipnya merupakan kesejahteraan agama dan pembayarannya merupakan kewajiban agama. Pelaksanaan pemungutan zakat seharusnya dilakukan oleh pemerintah dan didistribusikan untuk kesejahteraan sosial dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah SWT. Zakat dipungut terhadap pendapatan (laba), kepemilikan barang-barang tertentu seperti emas dan perak (atau disetarakan dengan uang), hewan ternak, dan hasil pertanian. Hal ini memerlukan penilaian dan konsep yang jelas untuk menetapkan dasar dan besarnya zakat yang harus dibayarkan.

Beberapa peneliti mengungkapkan perlunya konsep-konsep untuk menetapkan laba sebagai dasar pengenaan zakat, yang merupakan tujuan utama dalam akuntansi syariah. Hal ini diungkapkan Adnan dan Gaffikin (1997), Gambling dan Karim (1991), Baydoun dan Willet (1994), Tehri (2000), dan Rahman (2000) dalam Triyuwono, 2001, 3). Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution* (AAOIFI) dalam *Statement of Financial Conceptual Framework No. 1* yaitu dengan dibedakannya antara tujuan akuntansi keuangan dan laporan keuangan.

Keuntungan penggunaan laba sebagai dasar pembayaran zakat adalah dapat mengurangi masalah-masalah yang berkaitan dengan konflik kepentingan, terjadinya *window dressing*, dan kecurangan dalam penyajian dan pengungkapan laporan keuangan dapat diminimalisir sebaik mungkin. Karena setiap muslim (dalam hal ini seorang akuntan muslim) menyadari bahwa hal tersebut dilarang agama dan dia tidak akan mengambil barang yang bukan menjadi haknya.

Sarana lain selain zakat yang berkaitan dengan pembahasan konsep laba adalah larangan sistem bunga. Islam melarang sistem penentuan tingkat pengembalian tetap atas modal, misalnya pengembalian uang tanpa adanya pembagian resiko yang timbul dari pembayaran angsuran atas pinjaman. Larangan atas sistem bunga dimaksudkan karena sistem bunga merupakan cara-cara kapitalis dalam melaksanakan usaha. Dalam akuntansi konvensional investor seolah-olah dianggap sebagai peminjam modal bukan sebagai pemilik usaha (Triyuwono 2001; 3). Dalam Islam perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial dan moral yang berasal dari konsep Islam bahwa manusia diciptakan oleh Allah sebagai utusan (*khalifah*) di bumi untuk mengolah sumber daya yang diberikan untuk kesejahteraan manusia dan alam. Kepemilikan atas kekayaan dalam Islam tidak mutlak melainkan kondisional.

1. Pengukuran dan Pelaporan Laba

Pada dasarnya ada empat aliran pemikiran berkenaan dengan pengukuran yang lebih baik atas laba usaha (Belkaoui 2006; 230) yaitu:

1. Aliran klasik yang dicirikan terutama kepatuhan pada postulat unit pengukur dan prinsip biaya historis. Aliran ini dikenal secara umum dengan akuntansi biaya historis atau akuntansi historis. Aliran klasik menganggap laba akuntansi sebagai laba usaha.
2. Aliran neo-klasik yang dicirikan terutama oleh pembangkangnya terhadap postulat unit-pengukur, pengakuannya atas perubahan tingkat harga umum, dan kepatuhan kepada prinsip biaya historis. Dikenal secara umum sebagai akuntansi biaya historis yang disesuaikan terhadap tingkat harga umum, konsep laba aliran neo-klasik adalah laba akuntansi yang disesuaikan dengan tingkat harga umum.
3. Aliran radikal yang dicirikan oleh pilihannya atas nilai berjalan sebagai dasar penilaian. Aliran ini memilih harga sekarang (*current value*) sebagai dasar penilaian bukan *historical cost* lagi. Konsep ini dikenal

dengan *current value accounting*, sedang perhitungan labanya disebut *current income*.

4. Aliran noe radikal yang menggunkan *current value* tetapi disesuaikan dengan perubahan tingkat harga umum. Konsep ini dikenal dengan *general price level adjusted current value accounting*, sedangkan perhitungan labanya disebut *adjusted current income*.

2. Jenis – Jenis Laba

Menurut Sitepu (2005, 29), laba terbagi kedalam empat jenis dalam kaitannya dengan laba rugi, yaitu:

- a. Laba kotor. Laba kotor adalah selisih dari hasil penjualan dengan harga pokok penjualan
- b. Laba Operasional. Laba Operasional merupakan hasil dari aktivitas-aktivitas yang termasuk rencana perusahaan kecuali ada perubahan-perubahan besar dalam perekonomiannya, dapat diharapkan akan dicapai setiap tahun. Oleh karenanya, angka ini menyatakan kemampuan perusahaan untuk hidup dan mencapai laba yang pantas sebagai jasa pada pemilik modal.
- c. Laba sebelum dikurangi pajak atau EBT (*Earning Before Tax*) . Laba sebelum dikurangi pajak merupakan laba operasi ditambah hasil dan biaya diluar operasi biasa. Bagi pihak-pihak tertentu terutama dalam hal pajak, angka ini adalah yang terpenting karena jumlah ini menyatkan laba yang pada akhirnya dicapai perusahaan.
- d. Laba Setelah Pajak Atau Laba Bersih. Laba Bersih adalah laba setelah dikurangi berbagai pajak. Laba dipindahkan kedalam perkiraan laba ditahan. Dari perkiraan laba ditahan ini akan diambil sejumlah tertentu untuk dibagikan sebagai dividen kepada para pemegang saham.

3. Pendistribusian Laba

Laba merupakan istilah akuntansi yang sangat populer digunakan baik oleh pembuat laporan keuangan maupun oleh penggunaannya. Popularitas istilah laba antara lain disebabkan oleh fungsi laba yang sangat vital bagi perusahaan. Laba berfungsi sebagai standar penilaian kinerja (*performance*) perusahaan yang selanjutnya akuntansi menjadi dasar pertimbangan kreditor, investor, pemerintah, dan masyarakat umum.

Menurut Sitepu (2005, 38), pendistribusian *net income* perusahaan dapat dilihat

dari konsep-konsep berikut:

- a. *Net Income to Stockholders*. Pandangan yang paling tradisional dan telah diakui mengenai laba bersih adalah bahwa laba bersih merupakan hasil pengembalian (*return*) kepada pemilik laba. Pendekatan-pendekatan yang diperoleh perusahaan akan meningkatkan pemilikan dan biaya yang dikeluarkan akan menurunkannya. Jadi laba bersih yang merupakan kelebihan pendapatan atas biaya, secara langsung akan menambah kekayaan pemilik. Dividen kas merupakan penarikan modal, dan laba yang ditahan merupakan bagian dari total pemilikan. Sebaliknya, kerugian yang dialami perusahaan secara langsung akan mengurangi kekayaan pemilik.
- b. *Net Income to Investor*. Sesuai dengan *entity theory*, pemegang saham dan kreditor jangka panjang dianggap sama dengan investor, modal permanen dengan adanya pemisahan antara pemilikan (*ownership*) dan pengendalian (*control*) dalam perusahaan-perusahaan besar, maka perbedaan antara pemegang saham dan kreditor tidak lagi sepenting sebelumnya. Perbedaan utama hanya terletak pada prioritas hak dalam pembagian laba dan terhadap aset dalam likuidasi. Dalam *entity theory*, *income* bagi investor meliputi bunga atas hutang, dividen bagi pemegang *preffered common stock*, dan laba yang ditahan. Dalam perhitungan laba bersih bagi investor,

pajak penghasilan diperlakukan sebagai beban, karena pemerintah bukanlah penerimaan manfaat dari perusahaan dalam pengertian seperti investor.

- c. *Net Income to Residual Shareholders*. Dalam perusahaan yang menguntungkan dengan umur yang tidak terbatas, para pemilik modal residu terdiri dari pemegang saham biasa atau investor yang dapat menjadi pemegang saham biasa melalui konvensi atau pengguna hak lainnya. Salah satu dari kelompok investor lainnya yaitu pemegang saham preferen atau pemegang saham obligasi dapat menjadi pemilik ekuitas residu. Oleh karena itu, prioritas dalam hak atas laba merupakan hal yang penting bagi semua kelompok. Laba bersih residu menunjukkan jumlah yang tersedia untuk didistribusikan kepada pemegang hal residu.

2.1.5.5 Distribusi Laba untuk Pemerintah dalam Bentuk Pajak

Sebagai warga negara Indonesia, umat Islam juga memiliki kewajiban pajak bagi yang telah memenuhi syarat, karena telah dibuat undang-undang yang mewajibkan itu. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Dalam Islam, diperbolehkannya memungut pajak menurut para ulama alasan utamanya adalah untuk kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran, yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemadaramatan. Sedangkan mencegah kemadaramatan adalah juga suatu kewajiban. Pajak tidak boleh dipungut dengan cara paksa dan kekuasaan semata, melainkan karena ada kewajiban kaum muslimin

yang dipikulkan kepada Negara, seperti memberi rasa aman, pengobatan dan pendidikan dengan pengeluaran seperti nafkah untuk para tentara, gaji pegawai, hakim, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Kholis (2010) berpendapat pajak memang merupakan kewajiban warga Negara dalam sebuah Negara muslim, tetapi Negara berkewajiban pula untuk memenuhi dua kondisi (syarat), yaitu:

- a. Penerimaan hasil-hasil pajak harus dipandang sebagai amanah dan dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan-tujuan pajak.
- b. Pemerintah harus mendistribusikan beban pajak secara merata di antara mereka yang wajib membayarnya

Para ulama yang mendukung diperbolehkannya memungut pajak menekankan bahwa yang mereka maksud adalah sistem perpajakan yang adil, yang selaras dengan spirit Islam. Menurut mereka, sistem perpajakan yang adil adalah apabila memenuhi tiga kriteria:

- a. Pajak dikenakan untuk membiayai pengeluaran yang benar-benar diperlukan untuk merealisasikan maqasid Syariah.
- b. Beban pajak tidak boleh terlalu kaku dihadapkan pada kemampuan rakyat untuk menanggung dan didistribusikan secara merata terhadap semua orang yang mampu membayar.
- c. Dana pajak yang terkumpul dibelanjakan secara jujur bagi tujuan yang karenanya pajak diwajibkan

2.1.5.6 Distribusi Laba untuk Zakat

Menurut istilah fikih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak (Qardawi, 2007; 36). Menurut Qardawi (2007;36) Nabi Muhammad S.A.W. telah menegaskan di Madinah bahwa zakat itu wajib serta telah menjelaskan kedudukannya dalam Islam. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang utama, yaitu rukun Islam yang ketiga. Di

dalam beberapa hadis lain Rasulullah mengancam orang-orang yang tidak membayar zakat dengan hukuman berat di akhirat.

Menurut Qadrawari (2007;122), terdapat beberapa jenis kekayaan yang disebutkan dan diperingatkan Al-Quran untuk dikeluarkan zakatnya sebagai hak Allah, yaitu:

1. Emas dan perak, dalam firman Allah Surah At-Taubah ayat 34 yang artinya "*Orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak membelanjakannya buat jalan Allah, sampaikanlah kepada mereka berita gembira tentang azab yang sangat pedih*". (Q.S.9:34)
2. Tanaman dan buah-buahan, yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran Surah Al-Anam ayat 41 yang artinya, "*Makanlah sebagian buahnya bila berbuah dan bayarlah hak tanaman itu waktu menanamnya*" (Q.S. 6:141)
3. Usaha, misalnya usaha dagang dan lain, firman Allah Al-Baqarah ayat 276 yang artinya, "*Hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah sebagian yang baik dari penghasilanmu*" (Q.S. 2;276)
4. Barang-barang tambang yang dikeluarkan dari perut bumi.

Seseorang yang memiliki kekayaan perdagangan, masanya sudah berlalu setahun, dan nilainya sudah sampai nisab pada akhir tahun itu, maka orang itu wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%, dihitung dari modal dan keuntungan.

Untuk perusahaan, zakat didasarkan pada prinsip keadilan serta hasil ijtihad para fuqaha. Oleh sebab itu, zakat agak sulit ditemukan pada kitab fikih klasik. Kewajiban zakat perusahaan lainnya hanya ditujukan kepada perusahaan yang dimiliki oleh mayoritas muslim. Sehingga zakat ini tidak ditujukan pada harta perusahaan yang tidak dimiliki oleh muslim (Syafei, 2008 dalam Nurhayati, 2009; 285).

2.1.5.7 Distribusi Laba untuk Pemilik Dana

Dalam Mudharabah, terdapat nisbah keuntungan dimana ada besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, yang mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah atas keuntungan yang diperoleh. Pengelola dana mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan pemilik dana mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan harus diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak, inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua pihak mengenai cara pembagian keuntungan. Jika memang dalam akad tersebut tidak dijelaskan masing-masing porsi, maka pembagiannya menjadi 50% dan 50%. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Apabila terjadi kerugian, ditanggung oleh pemilik dana kecuali ada *misconduct*, *negligence*, atau *violation*, cara menyelesaikannya adalah sebagai berikut (Nurhayati, 2009;117):

- a. Diambil terlebih dahulu dari keuntungan karena keuntungan merupakan pelindung modal
- b. Bila kerugian melebihi keuntungan, maka baru diambil dari pokok modal.

2.1.5.8. Distribusi Laba untuk Karyawan

Suatu produksi tidak akan berjalan lancar tanpa adanya faktor-faktor produksi yang mendukung. Ada 4 faktor yang penting adalah tanah, tenaga kerja, modal dan manajemen. Keempat-empatnya sangat berperan dalam kelangsungan produksi tanpa adanya tanah, tenaga kerja, modal dan manajemen maka produksi tidak berjalan dengan efektif.

Demikian halnya tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang penting. Keberadaan tenaga kerja tidak boleh begitu saja dikesampingkan yang harus diperhatikan kesehatan dan kesejahteraannya. Hal yang tidak bisa lepas begitu saja dari tenaga kerja adalah upah. Penentuan upah merupakan salah satu

penentu efisien atau tidaknya kerja seorang tenaga kerja seperti yang sering terjadi di Indonesia sekarang tidak sedikit perusahaan yang menghentikain aktivitas produksinya karena para karyawan berdemo menuntut kenaikan upah.

Oleh karena itu perlu di perhatikan standar upah agar memberikan kerugian kepada kedua belah pihak yaitu pihak perusahaan dan karyawan, seperti yang terjadi pada masa Rasulullah SAW dan pada masa kekholidfahan.

Jika para pekerja tidak mendapatkan upah yang adil dan wajar, ini tidak hanya akan mempengaruhi daya beli dan taraf hidup para karyawan beserta keluarganya, Dengan demikian secara ekonomi sangat berbahaya bagi suatu Negara jika menghapuskan hak tenaga kerja atas pembagian dividen. Perselisihan dalam perdagangan dan industri menyebabkan kerugian tahunan yang besar baik kerugian waktu maupun uang daripada sedikit kenaikan upah yang diberikan kepada para pekerja.

Islam menetapkan mengenai masalah upah maupun masalah perlindungan terhadap kepentingan pekerja maupun majikan. Upah ditetapkan suatu cara masing- masing pihak memperoleh bagian yang sesuai dengan yang dikerjakannya, prinsip ditunjukkan dalam Al-Quran dalam Surah Al-Jathiyah ayat 22:

“Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan” (QS. 45:22)

Selain itu kedua belah pihak yang melakukan kontrak diperintahkan agar bersikap adil terhadap semua orang yang bertransaksi. Para pekerja harus memperoleh upahnya sesuai kontribusi pada produksi. Sedangkan para majikan akan menerima keuntungan dalam proporsi yang sesuai dengan modal dan kontribusinya dalam produksi.

Dengan demikian setiap orang akan memperoleh bagiannya serta dividen nasional yang sesuai dan tidak ada seorangpun yang akan dirugikan jadi tinggi

rendahnya upah seseorang dalam suatu pekerjaan itu semata dikembalikan kepada tingkat kesempurnaan jasa atau kegunaan tenaga yang berikan. Dan ini tidak bisa dianggap sebagai bonus dengan tujuan untuk meningkatkan produktifitas mereka. Namun ini semata adalah upah mereka yang memang berhak mereka terima karena kesempurnaan jasa mereka.

2.1.5.9.Laba Ditahan

Laba ditahan merupakan laba bersih yang tidak didistribusikan kepada para pemegang saham (Wibowo, 2009:60). Laba ditahan diklasifikasikan menjadi dua unsur, yaitu laba ditahan yang dicadangkan dan laba ditahan yang tidak dicadangkan. Cadangan laba ditahan merupakan laba ditahan yang dicadangkan untuk tujuan tertentu. Ada beberapa alasan mengapa perusahaan melakukan pencadangan terhadap laba ditahan (Wibowo, 2009:60), antara lain:

- a. Alasan perundang-undangan
- b. Alasan kontrak
- c. Alasan kemungkinan kerugian
- d. Alasan perlindungan pada posisi modal kerja

Laba ditahan pada dasarnya terbentuk dari akumulasi laba yang dipindahkan dari akun ikhtisar Laba-Rugi (*income summary*). Begitu saldo laba ditutup ke laba ditahan, sebenarnya saldo laba tersebut telah lebur menjadi elemen modal pemegang saham yang sah. Seperti juga modal setoran, laba ditahan menunjukkan sejumlah hak atas seluruh jumlah rupiah aset bukan hak atas jenis aset tertentu. Dengan demikian untuk mengukur seluruh hak pemegang saham atas aset, laba ditahan harus digabungkan (ditambahkan) dengan modal setoran.

Menurut Syihab (2012), laba ditahan dalam neraca syirkah Islam seharusnya dihilangkan dan ditiadakan, sebab saat perusahaan telah memperhitungkan keuntungan maka harta keuntungan tersebut sebenarnya telah ada yang memilikinya dengan jelas, yaitu semua pengelola dan investor yang terdaftar dalam perusahaan. Dengan demikian semua harta keuntungan harus

dibagikan dan diberikan kepada yang berhak, tidak boleh ditahan oleh pengelola.

2.1.6. *Shariah Enterprise Theory*

Meskipun *enterprise theory* oleh beberapa penulis dianggap sebagai teori yang paling pas untuk Akuntansi Syariah karena *enterprise theory* mengandung nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, amanah, dan pertanggungjawaban. Nilai-nilai tersebut telah sesuai dengan karakteristik dari Akuntansi Syariah yang telah dirumuskan oleh Triyuwono, yaitu : humanis, emansipatoris, transedental, dan teleologikal. Namun demikian, *enterprise theory* masih dibayangi oleh *agency theory* dan politisasi akuntansi. *Enterprise theory* masih bersifat duniawi dan tidak memiliki konsep tauhid (Slamet:2001). Agar konsep teoritis ini benar-benar sesuai dengan syariah, maka perlu diinternalisasikan nilai tauhid. Karena dengan konsep dan nilai tauhid kita dapat memperoleh legitimasi untuk memasukkan konsep kepemilikan dalam Islam, konsep zakat, konsep keadilan ilahi, dan konsep pertanggungjawaban.

Dalam *shariah enterprise theory* menurut Slamet (2001) dalam Triyuwono (2006) menjelaskan bahwa aksioma terpenting yang harus mendasari dalam setiap penetapan konsepnya adalah Allah sebagai Pencipta dan Pemilik Tunggal dari seluruh sumber daya yang ada di dunia ini. Maka yang berlaku dalam *shariah enterprise theory* adalah Allah sebagai sumber utama, karena Dia adalah Pemilik Tunggal dan Mutlak dari seluruh sumber daya yang ada di dunia ini. Sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para *stakeholders* pada prinsipnya adalah amanah dari Allah yang didalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Pemberi Amanah. Di Surah Al- Baqarah telah dijelaskan hal tersebut.

Surah : Al-Baqarah Ayat : 254

Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim.

Surah : Al-Baqarah Ayat : 267

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Surah : An-Nuur Ayat : 56

Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan ta'atlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.

Surah Al-Baqarah Ayat : 215

Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.

Surah : Al-Baqarah Ayat : 273

(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.

Ayat-ayat tersebut membawa implikasi penting dalam penetapan konsep-konsep dalam *shariah enterprise theory* (Slamet:2001). Yang utama adalah bahwa ayat-ayat tersebut membimbing kita pada suatu pemahaman bahwa dalam harta kita sebenarnya tersimpan hak orang lain, seperti : hak para fakir miskin, anak-anak terlantar, Ibnu Sabil, dan lain-lainnya seperti terlihat pada ayat berikut ini :

Surah : At-Taubah Ayat : 60

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana

Dengan demikian, dalam pandangan *shariah enterprise theory*, distribusi kekayaan (*wealth*) atau nilai tambah (*value added*) tidak hanya berlaku pada para partisipan yang terkait langsung dalam, atau partisan yang memberikan kontribusi kepada, operasi perusahaan; seperti pemegang saham, kreditor, karyawan, dan pemerintah, tetapi pihak lain yang tidak terkait langsung dengan

bisnis yang dilakukan perusahaan, atau pihak yang tidak memberikan kontribusi keuangan dan *skill*. Artinya, cakupan akuntansi dalam *shariah enterprise theory* tidak terbatas pada peristiwa atau kejadian yang bersifat *reciprocal* antara pihak-pihak yang terkait langsung dalam proses penciptaan nilai tambah, tetapi juga pihak lain yang tidak terkait langsung. Pemahaman ini tentu membawa perubahan penting dalam terminologi *enterprise theory* yang meletakkan premisnya untuk mendistribusikan kekayaan (*wealth*) berdasarkan kontribusi para partisipan, yaitu partisipan yang memberikan kontribusi atau keterampilan (*skill*) (Triyuwono:2006).

Pemikiran ini dilandasi premis yang mengatakan bahwa manusia itu adalah *khalifatullah fil Ardh* yang membawa misi menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan bagi seluruh manusia dan alam. Premis ini mendorong *shariah enterprise theory* untuk mewujudkan nilai keadilan terhadap manusia dan lingkungan alam. Oleh karena itu, *shariah enterprise theory* akan membawa kemaslahatan bagi *stockholders*, *stakeholders*, masyarakat (yang tidak memberikan kontribusi keuangan atau keterampilan) dan lingkungan alam tanpa meninggalkan kewajiban penting menunaikan zakat sebagai manifestasi ibadah kepada Allah (Slamet:2001 dalam Triyuwono:2006). *Shariah enterprise theory* merupakan teori enterprise yang telah diinternalisasi dengan nilai-nilai Islam guna menghasilkan teori yang transendental serta lebih humanis. *Syariah enterprise theory* merupakan hasil dari suatu refleksi diri yang tidak hanya didasari oleh kepentingan rasio semata, melainkan juga nilai-nilai spiritual. *Enterprise theory* seperti telah dibahas oleh beberapa penulis merupakan teori yang lebih tepat bagi suatu sistem ekonomi yang mendasarkan diri pada nilai-nilai syariah.

Pada prinsipnya *shariah enterprise theory* memberikan bentuk pertanggungjawaban utamanya kepada Allah (vertikal) yang kemudian dijabarkan lagi pada bentuk pertanggungjawaban (horizontal) pada umat

manusia dan lingkungan alam. Bentuk akuntabilitas semacam ini berfungsi sebagai tali pengikat agar akuntansi syari'ah selalu terhubung dengan nilai-nilai yang dapat membangkitkan kesadaran keTuhanan (Triyuwono:2006). *Shariah enterprise theory* yang dibangun berdasarkan metafora amanah dan metafora zakat, lebih menghendaki keseimbangan antara sifat egoistik dan altruistik dibanding dengan *entity theory*. Sementara *entity theory* lebih mengedepankan sifat egoistiknya daripada sifat altruistik (kepuasan bukan dalam bentuk materi, tapi secara spiritual).

Dengan menggunakan Epistemologi Berpasangan (Triyuwono:2006) dan metafora zakat, *shariah enterprise theory* berusaha menangkap *sunnatuLlah* dan menggunakannya sebagai nilai untuk membentuk dirinya. *Shariah enterprise theory* yang dikembangkan berdasarkan pada metafora zakat pada dasarnya memiliki karakter keseimbangan. Secara umum, nilai keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan antara nilai-nilai maskulin dan nilai-nilai feminin (Triyuwono 2000; Triyuwono 2006). *Shariah enterprise theory* menyeimbangkan nilai egoistik (maskulin) dengan nilai altruistik (feminin), nilai materi (maskulin) dengan nilai spiritual (feminin), individu-jama'ah dan seterusnya.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya konsekuensi dari nilai keseimbangan ini menyebabkan *shariah enterprise theory* tidak hanya peduli pada kepentingan individu (dalam hal ini pemegang saham), tetapi juga pihak-pihak lainnya,. Oleh karena itu, *shariah enterprise theory* memiliki kepedulian yang besar pada *stakeholders* yang luas. Menurut *shariah enterprise theory*, *stakeholders* meliputi tiga bagian :

1. Tuhan

Tuhan merupakan pihak paling tinggi dan menjadi satu-satunya tujuan hidup manusia. Dengan menempatkan Tuhan sebagai *stakeholder* tertinggi, maka tali penghubung agar akuntansi syari'ah tetap bertujuan pada “membangkitkan

kesadaran keTuhanan” para penggunanya tetap terjamin. Konsekuensi menetapkan Tuhan sebagai *stakeholder* tertinggi adalah digunakannya *sunnatuLlah* sebagai basis bagi konstruksi akuntansi syari’ah. Intinya adalah bahwa dengan *sunnatuLlah* ini, akuntansi syari’ah hanya dibangun berdasarkan pada tata-aturan atau hukum-hukum Tuhan.

2. Manusia

Stakeholder kedua dari *shariah enterprise theory* adalah manusia. Di sini dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu *direct-stakeholders* dan *indirect-stakeholders*. *Direct-stakeholders* adalah pihak-pihak yang secara langsung memberikan kontribusi pada perusahaan, baik dalam bentuk kontribusi keuangan (*financial contribution*) maupun non-keuangan (*non-financial contribution*). Karena mereka telah memberikan kontribusi kepada perusahaan, maka mereka mempunyai hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan. Sementara, yang dimaksud dengan *indirect-stakeholders* adalah pihak-pihak yang sama sekali tidak memberikan kontribusi kepada perusahaan (baik secara keuangan maupun non-keuangan), tetapi secara syari’ah mereka adalah pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan.

3. Alam

Golongan *stakeholder* terakhir dari *shariah enterprise theory* adalah alam. Alam adalah pihak yang memberikan kontribusi bagi mati-hidupnya perusahaan sebagaimana pihak Tuhan dan manusia. Perusahaan eksis secara fisik karena didirikan di atas bumi, menggunakan energi yang tersebar di alam, memproduksi dengan menggunakan bahan baku dari alam, memberikan jasa kepada pihak lain dengan menggunakan energi yang tersedia di alam, dan lain-lainnya. Namun demikian, alam tidak menghendaki distribusi kesejahteraan dari perusahaan dalam bentuk uang sebagaimana yang diinginkan manusia. Wujud

distribusi kesejahteraan berupa kepedulian perusahaan terhadap kelestarian alam, pencegahan pencemaran, dan lain-lainnya.

Shariah enterprise theory tidak mendudukan manusia sebagai pusat dari segala sesuatu sebagaimana dipahami oleh antroposentrisme. Tapi sebaliknya, *shariah enterprise theory* menempatkan Tuhan sebagai pusat dari segala sesuatu. Tuhan menjadi pusat tempat kembalinya manusia dan alam semesta. Oleh karena itu, manusia di sini hanya sebagai wakilNya (*khalituLlah fil ardh*) yang memiliki konsekuensi patuh terhadap semua hukum-hukum Tuhan. Kepatuhan manusia (dan alam) semata-mata dalam rangka kembali kepada Tuhan dengan jiwa yang tenang. Proses kembali ke Tuhan memerlukan proses penyatuan diri dengan sesama manusia dan alam sekaligus dengan hukum-hukum yang melekat di dalamnya. Tentu saja konsep ini sangat berbeda dengan *entity theory* yang menempatkan manusia dalam hal ini *stockholder* sebagai pusat. Dalam konteks ini kesejahteraan hanya semata- mata dikonsentrasikan pada *stockholders* (Kam 1990, p.315).

Konsekuensi dari diterimanya *shariah enterprise theory* sebagai dasar dari pengembangan teori akuntansi syari'ah adalah pengakuan *income* dalam bentuk nilai- tambah (*value-added*), bukan *income* dalam pengertian laba (profit) sebagaimana yang diadopsi *entity theory*. Baydoun & Willett (1994; 2000) dalam *islamic accounting theory* dan *islamic corporate reports*-nya telah menunjukkan nilai tambah. Namun apa yang disampaikan oleh mereka sebetulnya masih dalam bentuk yang sederhana dan lebih menekankan pada bentuk penyajian dalam Laporan Nilai Tambah (*value added statement*).

Untuk mendukung pernyataan konsep *shariah enterprise theory* mengenai tiga stakeholder yang dijelaskan, Meutia (2010) dalam tulisannya menjelaskan bahwa ada beberapa prinsip yang sebetulnya menggambarkan adanya hubungan antara manusia dan Penciptanya, yaitu Allah SWT. Prinsip-prinsip ini adalah berbagi dengan adil, *rahmatan lil alamin* (rahmat bagi seluruh alam), dan

maslaha (kepentingan masyarakat). Prinsip-prinsip ini sebetulnya punya keterkaitan yang kuat dengan tujuan ekonomi syariah yang mengedepankan kepentingan masyarakat banyak.

1. Prinsip Berbagi dengan Adil

Menurut Meutia (2010: 189), kata berbagi dalam Islam dinyatakan dalam banyak perintah Allah melalui zakat, infak, dan sedekah. Konsep ini, mengajarkan bahwa dalam setiap harta ada bagian atau hak untuk makhluk Allah yang lain. Selain itu, berbagi juga dimaknai sebagai berbagi hal yang non-materiil, seperti berbagi kebaikan serta menjalankan amar ma'ruf nahi munkar, saling menasehati atau mengajurkan berbuat kebaikan dan mencegah kejahatan. Dalam praktik perbankan syariah, hal ini bisa dimaknai sebagai aktivitas untuk ikut mendukung program-program kebaikan bagi manusia dan lingkungan ataupun ikut serta mencegah timbulnya kerusakan di muka bumi.

Dalam ajaran Islam, banyak sekali perintah yang mengingatkan manusia untuk berbagi kepada sesama, antara lain :

Surah Al – Baqarah 254

“Hai orang-orang beriman, infakkanlah sebagian rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat.”
(QS. Al-Baqarah: 254)

Surah Al – Anfal 3

“yaitu orang-orang yang melaksanakan zakat dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka.” (QS. Al-Anfal:3)

Surah Al – Hajj 41

“Orang-orang yang jika Kami berikan kedudukan di bumi, mereka melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat ma’ruf (baik), dan mencegah dari yang munkar (jahat), dan kepada Allah lah kembali semua urusan.” (QS. Al Hajj:41)

Prinsip berbagi dalam hal ini terkait erat dengan konsep keadilan yang dikatakan oleh Ahmad (2003) merupakan inti nilai dalam Islam. Keadilan merupakan salah satu komponen penting yang membentuk cara pandang islam mengenai masyarakat, karenanya suatu masyarakat ideal tidak mungkin terwujud tanpa adanya keadilan (Chapra, 2007: 16). Konsep islam mengenai keadilan menurut Kamali (2005) tidak sama dengan konsep formal mengenai keadilan, keadilan dalam islam merupakan bagian dari iman, karakter, dan kepribadian manusia. Keadilan merupakan karakteristik dari suatu system dan merupakan bagian yang sangat diperlukan dalam suatu sistem hukum, sosial, dan ekonomi (Ahmad:2003).

2. Prinsip *Rahmatan Lil’alamin* (Rahmat bagi Seluruh Alam)

Prinsip *rahmatan lil’alamin* bermakna keberadaan manusia seharusnya bisa menjadi manfaat bagi makhluk Allah lainnya. Dalam kerangka bank syariah, maka manfaat keberadaan bank syariah seharusnya dapat dirasakan oleh semua pihak baik yang terlibat maupun tidak terlibat langsung dalam aktivitas perbankan syariah. Menurut Meutia (2010: 221), bentuk *rahmat* atau keberpihakan ini dapat berupa pemberian zakat, infak, dan sedekah maupun pemberian pembiayaan kepada para pengusaha kecil. Prinsip *rahmatan lil’alamin* ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran :

“Dan tiadalah kami mengutus kamu (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam (rahmatan lil ‘alamin).” (QS. Al-Anbiya ‘: 107).

Sebagai agama yang *rahmatan lil ‘alamin*, agama Islam penuh dengan nilai-nilai persaudaraan, persatuan, cinta, dan kasih sayang sesama manusia. Agama Islam sangat menganjurkan untuk saling menjaga dan memelihara sesama manusia. Hal ini termasuk menjaga kelestarian lingkungan alam maupun menjaga kehidupan sesama manusia.

Meutia (2010: 194) menjelaskan bahwa meningkatkan kesejahteraan *stakeholders* merupakan bagian dari upaya menjadi *rahmatan lil alamin* dan menjadi tujuan ekonomi syariah. Kesejahteraan yang dimaksud adalah kesejahteraan material dan spiritual (*nafs, faith, intellect, posterity, dan wealth*). Kesejahteraan dalam tujuan syariah, dinyatakan Al Ghazali (2012: 3), tidak diperuntukkan bagi pemilik modal saja, namun bagi kepentingan semua *stakeholders* (*masalahah*).

3. Prinsip *Maslahah* (Kepentingan Masyarakat)

Al-Shatibi mengategorikan *masalahah* dalam tiga kelompok yaitu: *essentials* (daruriyyat), *complementary* (hajiiyyat), dan *embellishment* (tahsiniyyat).

Level yang pertama yaitu *daruriyyat* didefinisikan sebagai pemenuhan kepentingan-kepentingan pokok dalam hidup yang berkaitan dengan pencapaian tujuan syariah yaitu melindungi *faith* (iman), *life* (kehidupan), *intellect* (akal), *posterity* (keturunan), dan *wealth* (harta). Komponen *daruriyyat* dalam piramida masalah berada pada lapisan pertama, hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan atau melindungi kepentingan yang berkaitan dengan *daruriyyat* merupakan prioritas yang harus dilakukan. Implikasinya dalam tanggung jawab sosial perusahaan adalah bank syariah harus mengutamakan kepentingan yang berkaitan dengan *daruriyyat* merupakan prioritas yang harus dilakukan.

Adapun level kedua adalah *hajiyyat* merujuk pada kepentingan tambahan yang apabila diabaikan akan menimbulkan kesulitan tapi tidak sampai merusak kehidupan normal. Dengan kata lain, kepentingan perlu dipertimbangkan untuk mengurangi kesulitan atau mempermudah sehingga kehidupan akan terhindar dari kesusahan.

Level ketiga dari piramida *masalah* adalah prinsip *tahsiniyyat*. Kepentingan yang harus dipertimbangkan pada level ini adalah kepentingan yang berfungsi menyempurnakan kepentingan pada level sebelumnya. Dalam level ini bank syariah diharapkan menjalankan kewajiban tanggung jawab sosial dengan melakukan hal-hal yang dapat membantu menyempurnakan kondisi kehidupan stakeholdernya.

Menurut Meutia (2010: 196), mengutamakan kepentingan masyarakat (umat) dalam bentuk menjaga keimanan, kehidupan, keturunan, intelektual, dan kesejahteraan merupakan tujuan ekonomi syariah, yang seharusnya menjadi prioritas dari bank syariah. Penggunaan prinsip *masalah* sangat penting dalam praktik pengungkapan tanggung jawab sosial perbankan syariah. Menurut Meutia (2010: 229) dalam hal ini level Masalah yang diajukan Al-Shatibi dapat memberikan panduan yang jelas mengenai kepentingan apa dan siapa yang harus

didahulukan supaya tidak timbul ketidakadilan. Dusuki (2007) menilai bahwa klasifikasi *Maslahah* berhubungan dan punya keterkaitan yang erat dengan tujuan syariah yaitu memastikan bahwa kepentingan masyarakat dilindungi secara baik.

2.1.7. Metafora Amanah

Menurut Triyuwono (2006) amanah adalah sesuatu yang dipercayakan kepada orang lain untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan keinginan yang mengamanahkan, artinya bahwa pihak yang mendapatkan amanah tidak memiliki hak penguasaan (pemilikan) amanah tersebut dengan baik dan memanfaatkannya sesuai dengan yang dikehendaki oleh pemberi amanah.

Dengan kekuasaannya yang Maha Besar, Tuhan menciptakan manusia sebagai wakilnya di bumi (*khalifatullah fil Ardh*), seperti difirmankan dalam Al Qur'an :

Surah : Al-Baqarah Ayat : 30

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Kata khalifah ini memberikan suatu pengertian bahwa seseorang yang telah diangkat sebagai khalifah akan mengemban suatu amanah yang harus dilakukan sesuai dengan keinginan pengutusannya. Ini berarti bahwa penerima amanah dalam melakukan segala sesuatu, harus berdasarkan pada kesadaran diri

(*self consciousness*) bahwa ia sebenarnya adalah khalifah Tuhan (*khalifatullah fil ardh*) di bumi yang mempunyai konsekuensi bahwa semua aktivitasnya harus sesuai dengan keinginan Tuhan (*the will of God*). Atau, dengan ungkapan yang lain, penerima amanah harus menjadikan predikat khalifah Tuhan di bumi (*khalifatullah fil ardh*) sebagai cara pandang (perspektif) dalam setiap gerak langkah kehidupannya baik secara individual maupun secara komunal.

Dengan mengakui bahwa perspektif ini sebagai perspektif yang tunggal dan universal, maka penerima akan secara sadar mengetahui tentang amanah yang harus ditunaikannya, yaitu, mengelola bumi secara bertanggung jawab, atau dengan menggunakan bahasa Alquran, menyebarkan rahmat bagi seluruh alam. Singkatnya, manusia memiliki tugas mulia, yaitu menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan (materi dan non materi) bagi seluruh manusia dan alam semesta. Oleh karena itu, sangat wajar jika metafora amanah digunakan untuk mendesain bentuk, struktur, dan manajemen organisasi dalam rangka menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan.

2.1.8. Metafora Zakat

Akuntansi Syariah sedang mencari bentuk. Sehingga apa yang dipraktikkan di Bank Syariah atau di baitu mal wa tamwil, sebetulnya masih banyak berwujud akuntansi konvensional yang sarat dengan nilai-nilai kapitalisme. Nilai-nilai tersebut misalnya terlihat dalam konsep entity theory, accounting numbers, accounting income, dan lain-lainnya (Triyuwono, 2006).

Dalam bentuk yang lebih operasional, metafora amanah bisa diturunkan menjadi metafora zakat, atau realitas organisasi yang dimetaforakan dengan zakat (*zakat methaorised organisational reality*). Ini artinya adalah bahwa organisasi bisnis orientasinya tidak lagi *profit oriented*, atau *stockholders oriented*, tetapi *zakat oriented dan environment, and stakeholders oriented* (Triyuwono:2000).

Dengan orientasi zakat ini, perusahaan berusaha untuk mencapai angka pembayaran zakat yang optimum. Dengan demikian, laba bersih (*net profit*) tidak lagi menjadi ukuran kinerja (*performance*) perusahaan, tapi sebaliknya zakat, *environment*, dan *stakeholders* menjadi kriteria ukuran kinerja perusahaan.

Pengertian yang lebih luas dari metafora zakat adalah bahwa secara ideal teori Akuntansi Syariah harus dibangun berdasarkan pada konsep nilai zakat. Artinya bahwa Akuntansi Syariah tidak terbatas pada mengalihkan orientasi ke zakat, tetapi yang lebih fundamental adalah penggunaan konsep nilai zakat sebagai basis konstruksi teori Akuntansi Syariah. Konsep nilai zakat di sini tidak terbatas pada keseimbangan antara sifat materialistik dengan sifat prularistik, egoistik dan altruistik, maskulin dengan feminin, dan seterusnya. Nilai yang disebutkan ini melekat dalam konsep zakat.

Penggunaan metafora zakat untuk menciptakan realitas organisasi dengan beberapa makna, yaitu sebagai berikut :

1. Adanya transformasi dari pencapaian laba bersih (yang maksimal) ke pencapaian zakat. Ini berarti bahwa pencapaian laba bukan merupakan tujuan akhir (*the ultimate goal*) perusahaan, tetapi hanya sekedar tujuan antara.
2. Karena yang menjadi tujuan adalah zakat, maka segala bentuk operasi perusahaan harus tunduk pada aturan main (*rule of games*) yang diterapkan dalam syariah (atau tunduk pada etika bisnis)
3. Zakat mengandung perpaduan karakter kemanusiaan yang seimbang antara karakter egoistik (*egoistic, selfish*) dan altruistik/sosial (*altruistic, mementingkan lebih dulu kepentingan lain daripada kepentingan pribadi*). Karakter egoistik menyimbolkan bahwa perusahaan tetap diperkenankan untuk mencari laba (namun tetap dalam bingkai syariah), dan kemudian sebagian dari laba (dan kekayaan bersih) yang diperoleh dialokasikan sebagai zakat. Sedangkan altruistik mempunyai arti bahwa perusahaan

juga mempunyai kepedulian yang sangat tinggi terhadap kesejahteraan manusia dan alam lingkungan yang semuanya ini tercermin dalam zakat itu sendiri.

4. Zakat mengandung nilai emansipatoris, ia adalah lambang pembebas manusia dari ketertindasan ekonomis, sosial, dan intelektual, serta pembebas alam dari penindasan dan eksploitasi manusia.
5. Zakat adalah jembatan penghubung antara aktivitas manusia yang profan (duniawi) dan suci (*ukhrawi*). Zakat sebagai jembatan, memberikan kesadaran ontologis bagi diri manusia bahwa segala bentuk kegiatan profan selalu berkait erat dengan kedudukan manusia di hadapan Tuhan kelak di Akhirat (Triyuwono 2006; 2000).

Secara ideal, organisasi bisnis hendaknya dapat menciptakan realitas organisasinya berdasarkan pada metafora zakat. Implikasi dari hal ini adalah bahwa semua peringkat organisasi akan disusun sedemikian rupa sehingga benar-benar merefleksikan zakat sebagai metafora. Ini adalah sebuah bentuk transformasi. Transformasi ini tidak saja akan memengaruhi perilaku manajemen, *stockholders*, karyawan dan masyarakat sekelilingnya. Tetapi digunakan oleh organisasi yang bersangkutan (Triyuwono 2006; 2000). Namun demikian, ini bukan berarti bahwa bentuk organisasi adalah faktor satu-satunya yang dapat memengaruhi bentuk akuntansi. Faktor-faktor lain seperti sistem ekonomi, sosial, politik, peraturan perundang-undangan, kultur, persepsi, dan nilai yang berlaku dalam masyarakat, juga mempunyai tanggung jawab besar terhadap akuntansi. Ini juga adalah sebuah bukti bahwa akuntansi adalah sebuah entitas informasi yang tidak bebas nilai. Jika metafora zakat (realitas organisasi bermetaforakan zakat) secara sadar diterima dan dipraktikkan dalam kegiatan bisnis sebuah perusahaan atau dalam keseluruhan sistem bisnis, maka didalamnya akan tercipta apa yang dinamakan dengan realitas organisasi

dengan jaringan ilahi.

2.1.9. Laporan Nilai Tambah Syariah

2.1.9.1. Konsep Nilai Tambah Syariah

Value added menurut Haller dan Stolowy (1995) merupakan konsep tradisional yang berakar dari ekonomi makro, terutama berhubungan dengan penghitungan pendapatan nasional dengan pengukuran produktif dari ekonomi nasional yang biasanya dinamakan Produk Nasional atau Produk Domestik. Hal tersebut merepresentasikan nilai tambah perekonomian nasional dalam periode spesifik. Konsep *value added* dalam akuntansi terlihat dalam *Value added statement* (Staden, 2002). Pengukuran *Value added* menurut Staller dan Holowy dilakukan dua cara. Cara pertama disebut *subtractive/indirect method* yang menunjukkan *performance aspect*. Kedua, *additive/direct method* yang menunjukkan aspek sosial direpresentasikan sebagai penjumlahan bagian penciptaan kekayaan. (Mulawarman, 2009)

Value added statement saat ini juga mulai marak dalam bingkai akuntansi sosial (Mook, 2003) maupun *social and environmental accounting*. Akuntansi Sosial maupun Akuntansi Sosial dan Lingkungan lahir dari pemikiran terbatasnya akuntansi keuangan konvensional. Perkembangan akuntansi sosial dan representasinya yang berbentuk *Corporate Social Reporting* (CSR).

Value added statement pada dasarnya adalah semacam Laporan Laba-Rugi (dalam pengertian akuntansi konvensional). Laporan *value added* tersebut mengukur dan mengungkapkan posisi keuangan (melalui neraca), kinerja keuangan perusahaan (melalui laporan laba rugi), dan perlakuan keuangan perusahaan (melalui laporan perubahan posisi keuangan) (Belkaoui Riahi, 2006). Berbeda dengan Laporan Laba Rugi, *value added statement* ini lebih menekankan pada distribusi nilai tambah yang diciptakannya kepada mereka yang berhak menerimanya, Triyuwono (2006), seperti *benefesiciaries* dalam

bentuk zakat, infak, sedekah, pemerintah (pajak), pegawai (gaji), pemilik (dividen), dan dana yang ditanam kembali, *Value added statement* memberikan informasi yang sangat jelas tentang kepada siapa dan berapa besar nilai tambah yang diciptakan oleh perusahaan akan didistribusikan. Karena konsep ini mempunyai kepedulian yang lebih luas daripada konsep lainnya dalam distribusi income, *value added income* dalam hal ini adalah harga pasar dari produk atau jasa yang dijual perusahaan dikurangi dengan harga produk atau jasa yang diperoleh perusahaan (Triyuwono, 2006).

Nilai tambah merupakan peningkatan kesejahteraan yang dihasilkan oleh penggunaan sumber daya perusahaan yang produktif sebelum dialokasikan kepada pemegang saham, pemegang obligasi pegawai dan pemerintah, Belkaoui (2000) ini disebut konsep *enterprise net income*. Harahap (2008), mengusulkan Laporan Nilai Tambah sebagai bagian dari Laporan Akuntansi Syariah, Laporan Nilai Tambah ini masih merupakan wacana dalam teori akuntansi dan belum ada Negara yang mewajibkannya sebagai pengganti Laporan Laba-Rugi.

Laporan Laba-Rugi selama ini gagal memberikan Informasi tentang berbagai hal, yaitu sebagai berikut . :

1. Total Produktivitas dari Perusahaan
2. Pos-pos yang tidak dapat diukur secara akurat tidak dilaporkan dalam laporan laba rugi. Contoh, keuntungan dan kerugian yang belum terealisasi atau ekuitas atas sekuritas investasi tertentu tidak dicatat dalam laporan laba rugi apabila terdapat ketidakpastian bahwa perubahan nilai tersebut akan betul-betul terealisasi.
3. Angka-angka laba dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan. Contoh, sebuah perusahaan memilih untuk menyusutkan aktiva pabriknya atas dasar dipercepat; sementara perusahaan lainnya memilih penyusutan garis lurus.
4. Pengukuran laba yang melibatkan pertimbangan. Contoh, sebuah

perusahaan mungkin mengestimasi umur manfaat suatu aktiva selama 20 tahun sementara perusahaan lainnya memilih umur manfaat 15 tahun untuk jenis aktiva yang sama.

Laporan keuangan konvensional, menekankan informasinya pada laba atau penambahan kekayaan pemilik, maka Laporan Nilai Tambah menekankan pada upaya mengenerate kekayaan dan berapa yang degenerate, dan sebenarnya konsep nilai tambah masuk pengkajian konsep laba (*income concept*) dalam teori akuntansi konvensional, bedanya hanya terletak keikutsertaan laporan distribusi kekayaan tersebut kepada para *stakeholders* dan lainnya, dalam Laporan Laba Rugi biasanya hanya menggambarkan hak atau kepentingan pemegang saham saja, bukan seluruh tim yang ikut terlibat dalam kegiatan perusahaan (*stakeholder*), dimana secara konsep saat ini diakui bahwa penambahan kekayaan itu adalah usaha semua pihak, bukan hanya pemilik saham atau pengelola sehingga laporan tersebut akan lebih mencerminkan *full disclosure*. Ini yang dikenal merupakan pergeseran dari konsep *proprietary* ke *enterprise theory*. Perlu diingat bahwa *value added* tidak sama dengan laba. Laba menunjukkan pendapatan bagi pemilik saham, sedangkan penambahan nilai mengukur kenaikan kekayaan bagi seluruh *stakeholders*.

2.1.9.2 Keunggulan dan Kelemahan SVAS

Meskipun konsep nilai tambah belum mencapai tingkat penggunaan yang meluas dikarenakan belum adanya model laporan yang konvensional, namun beberapa penulis telah menguji beberapa kelebihan dan keterbatasan yang berhubungan dengan laporan nilai tambah. Kelebihan utama laporan nilai tambah terletak pada cakupan teknis multidimensional-nya dibanding model laporan keuangan konvensional. *Value added statement* dapat disajikan dalam

format kotor maupun bersih. Laporan nilai tambah memiliki beberapa keuntungan yang sangat baik (Belkaoui-Riahi, 2006), yaitu sebagai berikut :

1. Dengan adanya pengungkapan nilai tambah, para karyawan akan mendapat kepuasan karena mengetahui nilai dari kontribusi yang mereka berikan kepada kekayaan total perusahaan.
2. Nilai tambah mencerminkan dasar perhitungan bonus bagi para pekerja yang lebih baik.
3. Informasi nilai tambah telah terbukti dapat menjadi prediktor peristiwa ekonomi dan reaksi pasar yang baik.
4. Nilai tambah adalah ukuran yang lebih baik daripada penjualan.
5. Nilai tambah mungkin bermanfaat bagi kelompok-kelompok karyawan karena dapat memengaruhi aspirasi dan pikiran dari para perwakilannya dalam serikat pekerja yang melakukan negoisasi.
6. Nilai tambah dapat sangat bermanfaat dalam analisis keuangan dengan menghubungkan beragam peristiwa penting terhadap variable-variabel nilai tambah.

Sedangkan menurut Morley (1979) dalam Samudro (2004) bahwa keuntungan/kegunaan Laporan Nilai tambah merupakan alat prediksi yang andal. Rasio yang dibuat berdasarkan nilai tambah dapat digunakan untuk memprediksi dan mendeteksi keadaan ekonomi untuk kepentingan perusahaan. Beberapa contoh rasio yang dapat digunakan (Morley, 1979):

1. Rasio nilai tambah/upah. Selain untuk mengukur kontribusi pekerja terhadap nilai tambah yang terjadi, dapat juga digunakan untuk meramalkan kecenderungan dalam biaya tenaga kerja, selain itu juga dapat digunakan dalam negosiasi gaji.
2. Rasio pajak/nilai tambah sebagai indikator peran pemerintah dalam perusahaan.

3. Rasio nilai tambah/penjualan selain untuk mengukur pengaruh penjualan terhadap nilai tambah juga dapat digunakan untuk menentukan derajat integrasi vertikal pada suatu grup perusahaan. Rasio ini juga dapat dijadikan sebagai indeks daya tahan perusahaan terhadap perubahan pasokan bahan dan jasa.
4. Rasio nilai tambah/*capital employed* dapat digunakan untuk mengukur produktivitas modal yang digunakan dalam perusahaan.
5. Rasio nilai tambah/*operating assets* untuk mengukur produktivitas aset Operasional
6. Rasio nilai tambah/penyusutan sebagai ukuran produktivitas aktiva berwujud
7. Rasio laba operasional/nilai tambah sebagai ukuran kontribusi profit terhadap nilai tambah.

Harahap (2008) dalam Pohan (2010), juga memaparkan beberapa kegunaan Laporan Nilai Tambah dan kesesuaian dengan syariah sebagai berikut:

1. Konsep ini dinilai lebih objektif dan adil sehingga dianggap sebagai informasi yang absah sebagai dasar perhitungan *reward* dan penghargaan atas kinerja.
2. Pertambahan nilai kotor merupakan informasi yang sangat berguna untuk mengetahui angka reinvestasi (laba ditahan dan penyusutan)
3. Laporan ini dianggap dapat menyematani kepentingan akuntansi dan ekonomi dengan mengungkapkan jumlah kekayaan dalam pengukuran pendapatan nilai tambah social/nasional.
4. Pertambahan nilai bersih bisa menjadi dasar distribusi kekayaan bukan pertambahan nilai kotor.

Namun disamping keunggulannya ada juga keterbatasan laporan nilai tambah. Menurut Pohan (2010) dalam penelitiannya juga mengatakan bahwa :

1. Tidak semua pihak yang terlibat dalam menghasilkan pertambahan nilai itu merasa senang dengan informasi nilai tambah itu. Tidak jarang justru ada konflik, sehingga laporan ini justru bisa menimbulkan atau mempertajam konflik.
2. Ada kemungkinan dengan adanya laporan nilai tambah ini manajemen salah tanggap seolah ingin memaksimalkan pertambahan nilai, padahal sikap ini bisa menimbulkan *inefisiensi*.

Kesalahan penafsiran terhadap nilai tambah dapat menimbulkan salah pengertian seperti; Kenaikan pertambahan nilai dianggap kenaikan laba, kenaikan pertambahan nilai unit dianggap otomatis bermanfaat bagi pemegang saham, seolah dianggap bisa mengidentifikasi distribusi yang adil atas perubahan nilai tambah, nilai tambah yang tinggi untuk tenaga kerja unit dianggap merupakan prestasi ekonomi yang baik, *share* tenaga kerja yang besar atas pertambahan nilai tidak berhak mendapatkan gaji yang tinggi. Dan nilai ini bisa menimbulkan semacam harapan yang besar dari karyawan untuk mendapatkan nilai tambah yang lebih besar.

Ditambahkan pula oleh Mulawarman (2006) bahwa Laporan Nilai Tambah belum cukup memadai sebagai informasi akuntansi Islami karena tidak memberikan ruang pertimbangan *halal*, laporan nilai tambah hanya mementingkan aspek distribusi dan sumber daya ekonomi, pencatatan sumber daya (*sources*) untuk penentuan dan pendistribusian nilai tambah belum memastikan kepastian reduksi riba (*interest*).

2.1.9.3. Penyusunan dan Penyajian Laporan Nilai Tambah Syariah

Baydoun dan Willet (2000) memberi usulan yang lebih konkrit mengenai laporan keuangan yaitu *Islamic Corporate Reports* (ICRs). ICRs terdiri dari

Neraca berbasis nilai sekarang (*current value*), Laporan Nilai Tambah Syariah, dan Laporan Arus Kas. Rekomendasi tersebut berdasarkan pada akuntabilitas sosial (*social accountability*) dan pengungkapan penuh (*full disclosure*) dan beberapa prinsip pengukuran (*measurement*) teori akuntansi.

Tabel 2.1
Laporan Laba Rugi Bank Syariah

Pendapatan dan beban operasional	
Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib	XXX
Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer	(XXX)
Hak bagi hasil milik bank	XXX
Pendapatan operasional lainnya bersih	XXX
Beban penyisihan penghapusan Beban operasional lainnya	(XXX)
	<u>(XXX)</u>
Laba Operasional	XXX
Pendapatan (beban) non operasional	
Pendapatan non operasional	
Beban non operasional	XXX
Beban non operasional bersih	(XXX)
Laba Sebelum Pajak Manfaat	<u>XXX</u>
(beban) Pajak	XXX
Laba Bersih	<u>(XXX)</u>
	XXX

Tabel 2.2
Laporan Nilai Tambah Syariah

Sumber Nilai Tambah	
Pendapatan Operasi Utama	XXX
Pendapatan dari margin murabahah	XXX
Pendapatan dari istishna paralel	XXX
Pendapatan Sewa	
Ijarah	XXX
Pendapatan Bagi Hasil	
Mudharabah	XXX
Musyarakah	XXX
Pendapatan Operasi Utama Lainnya	XXX
Pendapatan Operasi Lainnya	XXX
Pendapatan Non Operasi	XXX
Total Pendapatan	XXX
Beban Operasional Lainnya	XXX
Total Nilai Tambah	XXX
Zakat	XXX
Total Nilai Tambah Bersih	XXX
Distribusi Nilai Tambah Bersih	
Nasabah bagi hasil	XXX
Karyawan (gaji)	XXX
Pajak	XXX
Dividen	XXX
Laba ditahan	XXX
Total Nilai Tambah	XXX

2.1.10 Stakeholder Theory

Timbulnya *stakeholder theory* yang dikemukakan oleh Evan dan Freeman (1993, dalam Triyuwono 2006) lebih didasari oleh suatu keadaan (hukum) yang mengunggulkan kepentingan pemegang saham dan, sebaliknya, mensubordinasikan kepentingan pemasok, pelanggan, karyawan, dan masyarakat sekelilingnya. Dua aspek penting yang dikemukakan oleh Evan dan Freeman dalam teorinya adalah hak (*right*) dan akibat (*effect*). Aspek pertama, *hak*, pada dasarnya menghendaki bahwa perusahaan dan para manajernya tidak boleh melanggar hak dan menentukan masa depan pihak lain (*stakeholders*); sedangkan yang kedua, *akibat*, menghendaki agar perusahaan dan manajemen harus bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukan. Teori ini dengan jelas menampilkan corak baru dalam mempersepsikan perusahaan dalam bentuk yang lebih sosial dan humanis, serta memberikan kesadaran etis tentang tanggung jawab sosial.

Sekarang ini perusahaan sudah tidak memandang bahwa *stakeholder* mereka hanya investor dan kreditor saja. Konsep yang mendasari mengenai siapa saja yang termasuk dalam *stakeholder* perusahaan sekarang ini telah berkembang mengikuti perubahan lingkungan bisnis dan kompleksnya aktivitas bisnis perusahaan. Pemerintah bisa saja dikatakan sebagai *stakeholder* bagi perusahaan karena pemerintah mempunyai kepentingan atas aktivitas perusahaan dan keberadaan perusahaan sebagai salah satu elemen sistem sosial dalam sebuah negara oleh karena itu, perusahaan tidak bisa mengabaikan eksistensi pemerintah dalam melakukan operasinya. Terdapatnya birokrasi yang mengatur jalannya perusahaan dalam sebuah negara yang harus ditaati oleh perusahaan melalui kepatuhan terhadap peraturan pemerintah menjadikan terciptanya sebuah hubungan antara perusahaan dengan pemerintah.

Hal tersebut berlaku sama bagi komunitas lokal, karyawan, pemasok, pelanggan, investor dan kreditor yang masing-masing elemen *stakeholder* tersebut memiliki kekuasaan, legitimasi, dan kepentingan sehingga masing-masing elemen tersebut membuat sebuah hubungan fungsional dengan perusahaan untuk bisa memenuhi kebutuhannya masing-masing.

2.2. Bank Syariah

2.2.1 Pengertian Bank Syariah

Menurut UU No. 21 Bank Konvensional didefinisikan sebagai bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Sedangkan, menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Allah berfirman di dalam kitab suci Al-Quran bahwa Islam adalah agama universal yang abadi :

“dan kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak ada mengetahui.”(Surah Sabah ayat 34).

Pada riwayat-riwayat yang sesuai kondisi tersebut , Rasulullah SAW bersabda :

”wahai umat manusia! Apa yang saya halalkan adalah halal sampai hari kiamat dan apa yang saya haramkan adalah haram sampai kiamat”(Hurr amuli 169/27 : 1413).

Salah satu penyebab dasar keabadian dan kesempurnaan islam adalah bahwa syariat yang dibawa Rasulullah SAW berdampingan dengan aturan dasar atau pilar dasar yang tidak berubah sesuai aturan yang fleksibel. Aturan-aturan dasar yang dilandaskan kepada syariah (*fiqih*) tentunya dikeluarkan berdasarkan pada aturan syariah itu sendiri dan pembedaannya dengan aturan-aturan pendukung yang dinamis dilandaskan pada pertimbangan *maslahat* sosial, penyediaan media-media pemikiran, pembaharuan dalam alat-alat perbankan yang digunakan seperti dalam masalah keuangan, pemberi tauladan untuk kegunaan perbankan untuk tenaga ahli muslim dan ahli keuangan dari sistem perbankan.

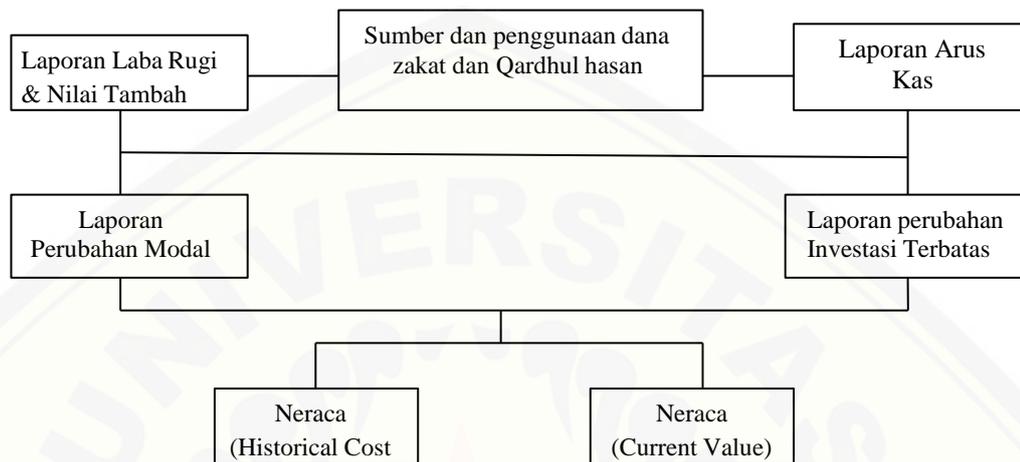
2.2.2. Laporan Keuangan Bank Syariah

Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap meliputi laporan keuangan atas kegiatan komersial dan/atau sosial. Laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (pengguna laporan keuangan) dalam pengambilan keputusan ekonomi yang rasional, seperti (Muhammad, 2005): *Shahibul maal*/pemilik dana, Pihak-pihak yang memanfaatkan dan menerima penyaluran dana, Pembayar zakat, infak, dan shadaqah, Pemegang saham, Otoritas pengawasan, Bank Indonesia, Pemerintah, Lembaga penjamin simpanan, dan Masyarakat.

Menurut Baydoun dan Willet (2000), bentuk laporan keuangan perusahaan yang lebih cocok dengan akuntansi Islam adalah *value added statement* bukan laporan laba rugi konvensional. Menurut beliau *value added statement* cenderung kepada prinsip-prinsip pertanggungjawaban sosial dan *stakeholders*. Dalam *value added statement*, informasi yang disajikan meliputi laba bersih yang diperoleh perusahaan sebagai nilai tambah yang kemudian didistribusikan secara adil kepada kelompok yang terlibat dengan perusahaan dalam

menghasilkan nilai tambah.

Gambar 2.3
Format Laporan Keuangan Perusahaan Islami



Sumber : Baydoun and Willet : 2000

Bentuk dan jenis Laporan Keuangan Akuntansi Islam adalah sebagai berikut menurut Harahap (dalam Mulawarman 2009):

1. Neraca dimana dimuat juga informasi tentang karyawan, dan akuntansi SDM.
2. Laporan Nilai Tambah sebagai pengganti Laporan Laba Rugi.
3. Laporan Arus Kas.
4. *Socio Economic* atau Laporan Pertanggungjawaban Sosial.
5. Catatan penyelesaian laporan keuangan yang bisa berisi laporan: yang mengungkapkan lebih luas tentang laporan keuangan yang disajikan, Laporan tentang berbagai nilai dan kegiatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Misalnya dengan juga menyajikan pernyataan Dewan Pengawas Syariah, menyajikan informasi tentang efisiensi, *good*

governance dan laporan produktivitas.

Sedangkan Laporan keuangan yang lengkap menurut PSAK No. 101 terdiri dari komponen-komponen berikut ini:

1. Neraca
2. Laporan Laba Rugi
3. Laporan Perubahan Ekuitas
4. Laporan Arus Kas
5. Laporan Perubahan Dana Investasi Terkait
6. Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil
7. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat
8. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
9. Catatan atas Laporan Keuangan

Bank Islam atau dikenal juga dengan sebutan bank syariah, merupakan bank yang seharusnya menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah. Tidak seperti bank konvensional yang cenderung menekankan pada pengungkapan laba, penilaian resiko dan aspek non-sosial lainnya, bank Islam harus mengungkapkan informasi yang penting bagi para pengguna laporan mereka guna pengambilan keputusan untuk menunjukkan tanggung jawab mereka pada Tuhan dan masyarakat.

Triyuwono (2005) dalam Meutia mengungkapkan bahwa tingkat penilaian kesehatan bank syariah menyatakan bahwa kesehatan bank syariah antara lain dapat diukur dengan *give out* dan *socio economic-wealth*. *Give out* bermakna distribusi kesejahteraan yang telah berhasil diciptakan oleh bank syariah. Kesejahteraan menurut perspektif syariah harus didistribusikan kepada *direct participant*, *indirect participant* dan alam. Sedangkan *socio economic-wealth* merupakan faktor hasil khususnya pada tingkat kesejahteraan materi.

Lebih jauh Triyuwono menyatakan bahwa *socio economic wealth* ini secara alami melekat pada diri bank syariah. Meniadakan *socio economic wealth* ini berarti menghilangkan jati diri bank syariah. Berdasarkan perspektif Triyuwono, ini sangat jelas bahwa bank syariah memiliki tanggungjawab sosial-ekonomi yang besar terhadap *direct participant*, *indirect participant* dan alam.

Beberapa penelitian yang ada mengindikasikan bahwa bank syariah tidak sepenuhnya memenuhi peran sosial-nya seperti yang diinginkan oleh prinsip syariah. Sebagai contoh, bank Islam seharusnya lebih menekankan pada pembiayaan *profit and loss sharing (musharakah)*, namun pada kenyataannya, sangat sedikit bank Islam yang memberikan perhatian pada aspek sosial ini. Hal tersebut terjadi karena belum dipenuhinya fungsi bank syariah yang memuat nilai-nilai Islam dimungkinkan terjadi karena dalam beberapa aspek institusi keuangan Islam ini masih berpegang pada standar akuntansi konvensional termasuk dalam hal pengungkapan. Harahap (2003) dalam Meutia, mengungkapkan bahwa biarpun *Accounting, Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI)* telah dikembangkan, namun standar akuntansi di dalamnya kebanyakan masih berdasarkan pada konsep akuntansi konvensional yang dipenuhi oleh nilai-nilai kapitalisme dan sekulerisme.

Di Indonesia, PSAK No 59 yang mengatur mengenai perbankan syariah, dalam kenyataannya masih menggunakan *entity theory* sebagai basis teori dalam penyusunannya. PSAK 59 hanya mengatur hal-hal umum yang bersifat keuangan dan kuantitatif. Karenanya jika kita melihat laporan bank syariah baik laporan tahunan maupun laporan keuangan, maka fungsi tanggungjawab sosial hanya muncul dalam bentuk laporan zakat dan qardul hasan serta beberapa tindakan donasi yang tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan oleh perusahaan pada umumnya. Walaupun PSAK 59 ini sudah digantikan dengan PSAK 101 – 106, namun secara substansi tidak banyak perubahan yang berarti berkaitan dengan bank Islam secara murni.

2.3. Keadilan

2.3.1 Pengertian Keadilan

Keadilan secara hakiki merupakan suatu konsep yang relatif. Skala keadilan sangat beragam antara suatu negara dengan negara lain, dan masing-masing skala didefinisikan serta ditetapkan oleh masyarakat sesuai dengan tatanan sosial masyarakat. Keadilan dalam Islam memiliki implikasi sebagai berikut (Khudduri, 1999):

- a. Keadilan Sosial. Islam menganggap umat manusia sebagai suatu keluarga. Karena semua anggota keluarga ini mempunyai derajat yang sama di hadapan Allah. Hukum Allah tidak membedakan kaya dan yang miskin, demikian juga tidak membedakan yang hitam dan putih. Secara sosial, nilai yang membedakan satu dengan yang lain adalah ketakwaan, ketulusan hati, kemampuan dan pelayanan pada manusia.
- b. Keadilan ekonomi. Konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama bagi setiap individu dalam masyarakat dan dihadapan hukum harus diimbangi oleh keadilan ekonomi. Tanpa pengimbangan tersebut, keadilan sosial kehilangan makna. Dengan keadilan ekonomi, setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi masing-masing kepada masyarakat. Setiap individu pun harus terbebaskan dari eksploitasi individu lainnya. Islam dengan tegas melarang seorang muslim merugikan orang lain. Sebagaimana firman Allah dalam Surah Asy-Syu'araa': 183):

“Dan janganlah kalian merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kalian merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”.

2.3.2. Nilai Keadilan dalam Akuntansi Syariah

Keadilan merupakan konsep lengkap yang harus dikaitkan dengan seluruh aspek kehidupan baik sosial, politik, ekonomi, dan spiritual. Kapanpun kita memasuki kehidupan sosial masalah keadilan tidak dapat diabaikan, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Pentingnya nilai keadilan diterapkan dalam kegiatan ekonomi sebab disana selalu ditemukan hal-hal yang adil dan hal-hal yang tidak adil.

Jiwa tatanan ekonomi Islam adalah kesinambungan yang adil. Jika kapitalisme memayungi kaum pemilik modal dan sosialisme memayungi kaum buruh, maka ekonomi Islam memayungi keduanya. Hal ini terlihat jelas pada sikap Islam terhadap hak individu dan masyarakat. Ekonomi Islam tidak menzalimi masyarakat khususnya kaum yang lemah sebagaimana yang terjadi di masyarakat kapitalis. Islam juga tidak menzalimi hak individu, sebagaimana yang dilakukan kaum sosialis. Islam mengakui hak individu dan masyarakat, juga meminta mereka melaksanakan kewajiban masing-masing. Dengan demikian, Islam menjalankan peranannya dengan pemenuhan keadilan serta kebijaksanaan. Termasuk dalam prinsip keadilan adalah memberikan upah kepada pekerja sesuai dengan keahlian kerja dan kontribusi yang mereka berikan. Berbeda halnya dengan seorang pekerja yang bersyarikat dengan pemilik modal baik dalam keuntungan ataupun kerugian. Dalam sistem ini, tidak boleh ditentukan bagi salah satu diantara kedua hasil yang akan mereka peroleh, hasil yang akan mereka terima harus berdasarkan perjanjian terhadap bagian tertentu dari keuntungan. Jika proyeksi rugi, maka kerugiannya ditanggung pemilik modal, cukuplah bagi pengelola kerugian jerih payahnya (Qardawi, 1997:410).

Selanjutnya untuk menciptakan keadilan dalam kegiatan ekonomi dibutuhkan akuntansi sebagai media pendekatan dan pelaporan transaksi. Tujuan pencatatan dalam Islam adalah untuk kebenaran, kepastian, keterbukaan, dan keadilan. Antara dua atau beberapa pihak yang mempunyai hubungan mu'amalat.

Akuntansi harus bisa menjamin bahwa informasi-informasi yang disusun dan disajikan harus benar-benar bebas dari unsur penipuan dan ketidakadilan, serta bebas dari pemihakan kepada kepentingan kelompok tertentu. Informasi yang diberikan harus transparan, teruji, dan dapat dipertanggungjawabkan dunia akhirat.

Dalam konteks ini, akuntan jangan hanya berhenti pada masalah perlakuan pendapatan, pengakuan, pelaporan persediaan, pemilihan metode penyusutan, perlakuan pada pembayaran dimuka, dan sebagainya. Isu pokok mesti dijadikan fokus perhatian adalah manakah metode yang adil dan menggambarkan apa yang telah terjadi dalam batas-batas sosial dan perilaku yang dialami (Harahap, 2001:183).

2.3.3. Keadilan dalam Pendistribusian Laba

Kesenjangan pendapatan dan kekayaan alam yang ada di masyarakat, berlawanan dengan semangat serta komitmen Islam terhadap persaudaraan dan keadilan-keadilan sosial-ekonomi. Kesenjangan harus diatasi dengan menggunakan cara yang ditekankan Islam. Konsep keadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan serta konsep keadilan ekonomi, menghendaki setiap individu ekonomi mendapatkan imbalan sesuai dengan amal dan karyanya. Ketidaksamaan pendapatan dimungkinkan dalam Islam karena kontribusi masing-masing orang kepada masyarakat berbeda-beda.

Islam membenarkan seseorang memiliki kekayaan lebih dari yang lain sepanjang kekayaan tersebut diperoleh secara benar dan yang bersangkutan telah menunaikan kewajibannya bagi kesejahteraan masyarakat, baik dalam bentuk zakat maupun amal kebajikan lain seperti infak dan sedekah. Meskipun demikian, Islam sangat menganjurkan golongan yang kaya untuk tetap tawadhu dan tidak pamer.

Sehubungan dengan laba perusahaan, akuntansi syariah memberikan alternatif filosofi dalam upaya merekonstruksi konsep akuntansi termasuk di dalamnya konsep laba. Pengertian konsep laba dalam akuntansi syariah dirumuskan secara deduktif berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadist.

Mengenai tata cara mekanisme distribusi pendapatan kepada individu, dilakukan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan sebab-sebab kepemilikan serta transaksi-transaksi yang wajar. Faktor utama yang menentukan pendistribusian kekayaan atau laba adalah kasih sayang dan keadilan, karena tujuan pendistribusi ini adalah agar kekayaan tidak menumpuk pada golongan kecil masyarakat tetapi selalu beredar dalam masyarakat, dan agar faktor produksi yang terkait memperoleh bagian yang adil sesuai dengan hak masing-masing.

Hanya saja perbedaan individu dalam masalah kemampuan dan kebutuhan bisa menyebabkan perbedaan distribusi pendapatan tersebut diantara mereka. Kesalahan dalam hal mekanisme distribusi kekayaan ini akan menyebabkan ketidakadilan, misalnya dengan terdistribusinya kekayaan tersebut kepada segelintir orang saja, sementara yang lainnya kekurangan.

Salah satu bentuk kemitraan perusahaan dalam konteks syariah adalah mudharabah. Bentuk mudharabah ini memiliki ciri-ciri yang hampir sama dengan perseroan terbatas saat ini, dimana terdapat pemisahaan antara pemilik perusahaan (*stockholder*) dengan manajemen. Dalam sistem mudharabah ini, laba bersih perusahaan didistribusikan kepada pemilik modal dan manajemen. Walaupun demikian, perusahaan juga harus memperhatikan hak-hak pihak lain yang terkait dengan perusahaan dengan cara:

- a. Memberikan gaji yang layak kepada karyawan yaitu dengan didasarkan kepada kadar jasa yang diberikannya.
- b. Membayar atau melunasi pinjaman kepada kreditur.
- c. Membayar pajak kepada pemerintah sesuai dengan peraturan perpajakan
- d. Mengeluarkan zakat sesuai dengan ketentuan zakat.

Laba tidak sekedar dimaknai sebagai keuntungan dalam bentuk materi atau uang semata. Laba muncul dari sebuah interaksi sosial di antara pihak-pihak yang terkait dengan aktivitas perusahaan. Menurut Subiyantoro (2004, 199), salah satu kemarahan Marx terhadap pemilik modal adalah ketika para pemilik modal mengambil atau berperilaku tidak adil menyangkut pembagian nilai lebih. Nilai lebih inilah yang menurut Marx sebagai sumber laba dari pemilik modal. Menurut Subiyantoro (2005, 202), ada tiga komponen utama yang mempunyai hak yang sama atas keadilan suatu entitas perusahaan, yaitu:

1. Pemilik modal dalam hal ini jelas mempunyai hak dan proporsi terhadap laba perusahaan. Namun demikian, bukan karena ia pemilik modal maka seenaknya mengambil jatah atau menentukan haknya secara berlebihan, karena penentuan hak secara berlebihan ini akan merugikan pihak lain untuk mendapatkan haknya. Ada aturan dan proporsi yang harus disepakati bersama antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan jalan menabulasi kebutuhan, pemilik perusahaan dapat mengambil haknya sesuai dengan ketentuan yang disepakati.
2. Karyawan adalah bagian utama di samping pemilik perusahaan dalam suatu entitas perusahaan. Keadilan menurut karyawan tentunya keadilan yang sesuai dengan tingkat proporsi dan pekerjaannya. Bukan karena semata-mata ia bekerja maka perusahaan dengan seenaknya memberi bagian yang menurut perusahaan cukup. Keadilan bagi karyawan adalah ketika perusahaan tidak saja telah memenuhi standar kebutuhannya, tetapi

perusahaan juga memperhatikan kelangsungan hidup karyawan secara lebih jauh, seperti kesehatan, psikologi, dan sebagainya. Namun demikian bukan berarti karyawan bisa menentukan dengan seenaknya saja. Semua kembali kepada aspek-aspek kemampuan perusahaan yang diketahui secara bersama.

3. Laba setidaknya juga menjadi hak bagi pihak-pihak luar perusahaan selain karyawan dan pemilik modal. Pihak luar disini seperti pemasok, pembeli dan lingkungan sosial lainnya.

2.4. Penelitian Terdahulu

Peneliti tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama pernah dilakukan. Penelitian terdahulu yang berkaitan pernah dilakukan oleh :

1. Penelitian Kurniasari (2011)

Menurut Kurniasari (2011), dalam penelitian dengan objek penelitian berupa Laporan keuangan menunjukkan bahwa terjadi kenaikan nilai tambah sebesar 7,50% pada tahun 2008 dan 18,33% pada tahun 2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan perhitungan distribusi nilai tambah dapat dilihat bahwa BMI bukanlah instansi atau perusahaan yang bersifat *shareholder oriented*. Berdasarkan laporan nilai tambah, terlihat bahwa selain mengutamakan para pemegang saham serta perusahaannya, ternyata Bank Muamalat Indonesia lebih peduli pada *stakeholder* terlebih pada para penyandang dana serta karyawan.

2. Penelitian Damastuti (2010)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan kinerja keuangan bank syariah dengan menggunakan pendekatan laba rugi dan nilai tambah berdasarkan rasio keuangan. Rasio keuangan yang digunakan terdiri dari ROA, ROE, rasio perbandingan antara total laba bersih dengan total aktiva produktif, NPM, dan BOPO. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah PT. Bank Muamalat

Indonesia Cabang Semarang. Populasi dari penelitian ini adalah laporan keuangan PT. BMI Cabang Semarang, sedangkan sampel yang digunakan adalah laporan keuangan tahun 2007-2009 untuk masing-masing pendekatan yaitu *income statement approach* dan *value added approach*. Alat analisis yang digunakan untuk membuktikan hipotesis penelitian ini adalah *independent sample t-test*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata rasio keuangan (ROA, ROE, perbandingan laba bersih dengan aktiva produktif, dan NPM) terdapat perbedaan yang signifikan antara *income statement approach* dan *value added approach*, sedangkan pada rasio BOPO antara *income statement approach* dan *value added approach* tidak terdapat perbedaan. Akan tetapi bila dilihat secara keseluruhan tingkat profitabilitas menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara *income statement approach* dan *value added approach*. Dari hasil interpretasi yang dilakukan, dapat disimpulkan adanya perbedaan penerapan teori yang digunakan dalam Laporan Laba Rugi dan Laporan Nilai Tambah. Laporan Laba Rugi menggunakan *entity theory* yang menekankan pendapatan operasi utamanya untuk dibagikan dan hanya dikhususkan untuk pemilik modal, sedangkan Laporan Nilai Tambah menggunakan *syariah enterprise theory* yang lebih menerapkan prinsip keadilan dimana nilai tambah akan didistribusikan kepada semua pihak yang terlibat dalam menghasilkan nilai tambah tersebut.

3. Penelitian Samudro (2004)

Berdasarkan penelitian Samudro menjelaskan bahwa Kebijakan pemerintah untuk memprivatisasi BUMN (di BUMN) Indosat pada tahun 2002 menimbulkan kontroversi antara pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas dengan pihak Indosat lainnya terutama karyawan dan masyarakat umum. Protes Focal adalah masalah nasionalisme dalam kaitannya dengan keamanan negara karena pemegang saham mayoritas baru adalah Singapura dan Teknologi Telemedia (STT) terutama sebagai agen asing. Subjek tulisan ini tidak menyangkut masalah

keamanan negara tetapi untuk menilai kinerja keuangan Indosat sebelum dan sesudah privatisasi dengan menggunakan analisis pernyataan nilai tambah. Apakah ini akhir privatisasi perusahaan telekomunikasi dengan keuntungan finansial atau meningkatkan nilai tambah kepada setiap *stakeholders* analisis utama dari artikel ini.

Dari hasil penelitian yang diperoleh dinyatakan bahwa Privatisasi Indosat yang banyak mengundang kontroversi ternyata membawa manfaat yang terlihat langsung pada laporan nilai tambah kepada karyawan dan kreditor. Karyawan menikmati manfaat dengan dilakukannya standarisasi gaji antara Indosat dengan Satelindo, Bimagraha dan IM3. Pemberi pinjaman menerima manfaat dari semakin besarnya pembayaran bunga karena Indosat menambah jumlah hutang jangka panjang dan obligasinya.

Penurunan porsi pemegang saham seperti yang tercermin dalam dividen 2002 merupakan konsekuensi langsung dari anjloknya laba bersih. Penurunan laba bersih ini merupakan suatu hal yang temporer mengingat sebab utamanya bukanlah karena kegiatan operasional Indosat. Pos-pos penyebab anjloknya laba bersih tersebut adalah amortisasi goodwill, penyisihan piutang bunga ragu-ragu obligasi konversi, penyesuaian piutang usaha dari PT Telkom, pos lain-lain, dan laba pra akuisisi. Penurunan porsi nilai tambah pemerintah yang ditunjukkan dalam pajak merupakan abnormalitas yang terjadi pada tahun 2002 dan 2003 disebabkan oleh keuntungan penjualan Telkomsel dan pembalikan kewajiban pajak anak perusahaan.

4. Penelitian Subroto (2005)

Menurut Subroto, nilai tambah bukanlah sebuah konsep yang baru, tetapi satu hal yang pasti, bahwa konsep nilai tambah bukanlah berasal dari khazanah disiplin akuntansi. Konsep ini pada mulanya dipakai oleh pakar ekonomi, apakah konsep itu perlu dimasukkan ke dalam praktek pelaporan keuangan, hanya di Inggrislah laporan nilai tambah memiliki akar dan mengalami perkembangan pesat. Laporan nilai tambah menekankan kinerja permitraan dalam menciptakan kekayaan,

sementara perhitungan laba rugi secara tradisional memperhatikan laba atau rugi dari sudut pandang pemegang saham, laporan nilai tambah memperlihatkan penghasilan entitas yang lebih besar dan sekaligus memperlihatkan bagaimana penghasilan tersebut dibagikan di antara para penyumbanganya. Dengan cara yang berbeda dapat dinyatakan, bahwa laporan nilai mengajukan pertanyaan yang berbeda dengan perhitungan laba rugi.

5. Penelitian Pohan (2010)

Menurut Penulis ada beberapa kesimpulan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai Penerapan Laporan Nilai Tambah yaitu sebagai berikut:

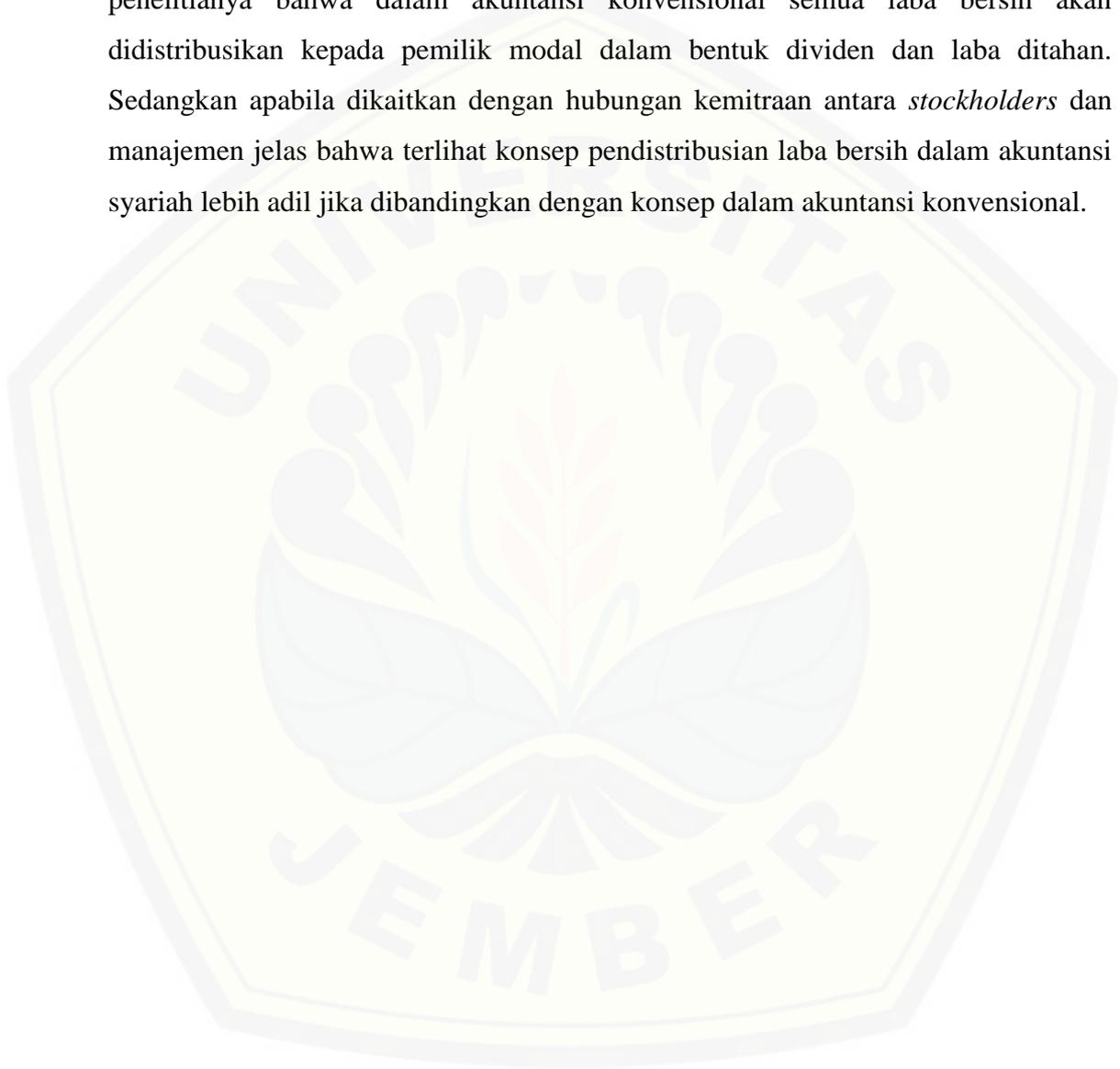
- a. Laporan Nilai Nilai Tambah mempunyai dua pendekatan yaitu : *additive methode* dan *subtractive methode*, dua pendekatan ini dipraktekkan secara umum di Negara-negara Jerman, Prancis, Inggris, Australia, walaupun standar yang baku belum mengaturnya.
- b. Untuk entitas syariah di Indonesia penerapan Laporan Nilai Tambah mutlak dilakukan karena sangat sesuai dengan syariat islam yaitu prinsip kebenaran dan kejujuran, prinsip keadilan, dan prinsip pertanggungjawaban. Akan tetapi karena ketiadaan standar yang mengatur dan mengharuskannya, maka penerapan Laporan Nilai Tambah belum lazim dilaksanakan di Indonesia .

6. Penelitian Waktu (2005)

Waktu Sitepu tahun 2005 dari Universitas Widyatama. Sitepu (2005) membandingkan distribusi laba bersih antara akuntansi konvensional dengan akuntansi syariah. Dari hasil penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa dalam akuntansi konvensional ideologi yang mendominasi adalah kapitalisme dengan memiliki ciri-ciri materialisme, kebebasan mutlak, persaingan bebas dan sekularisme. Sedang akuntansi syariah didasarkan pada syariah Islam dengan nilai dasar yang

disebut dengan metafora amanah. Kekayaan yang dimiliki oleh manusia merupakan amanah dari Allah, sehingga cara memperoleh, mengelola, dan mengembagkannya harus sesuai dengan ketentuan syara'.

Dalam hal pendistribusian laba, Sitepu (2005) mengemukakan pada hasil penelitiannya bahwa dalam akuntansi konvensional semua laba bersih akan didistribusikan kepada pemilik modal dalam bentuk dividen dan laba ditahan. Sedangkan apabila dikaitkan dengan hubungan kemitraan antara *stockholders* dan manajemen jelas bahwa terlihat konsep pendistribusian laba bersih dalam akuntansi syariah lebih adil jika dibandingkan dengan konsep dalam akuntansi konvensional.



BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu teknik atau cara mencari, memperoleh, mengumpulkan data, baik berupa data primer maupun data sekunder yang dapat digunakan untuk proses penyusunan karya ilmiah dan sejenisnya dan kemudian menganalisa faktor-faktor yang berhubungan dengan pokok permasalahan sehingga akan didapat suatu kebenaran atau data yang akan diperoleh. Dalam penelitian dan penyusunan ini jenis metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Sugiyono (2010:29).

Tujuan metode deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta-fakta sifat-sifat serta hubungan fenomena yang diselidiki. Metode ini tidak hanya memberikan gambaran mengenai fenomena tetapi juga menerangkan hubungan, menguji hipotesa-hipotesa, membuat prediksi, serta mendapatkan makna dari suatu masalah yang ingin dipecahkan.

Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sebagai instrumen pokok. Oleh karena hal itu, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas agar dapat melakukan wawancara secara langsung terhadap responden, menganalisis, dan mengkonstruksikan obyek yang diteliti agar lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Menurut Sugiyono (2011:13), penelitian

kualitatif memiliki beberapa karakteristik yaitu dilakukan pada kondisi yang alamiah, bersifat deskriptif, menekankan pada proses, analisis data secara induktif, serta lebih menekankan pada makna.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Metoda yang digunakan untuk memperoleh data yang diinginkan adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Dilakukan dengan membuka website dari objek yang diteliti, sehingga dapat diperoleh laporan keuangan, gambaran umum bank dan perkembangannya yang kemudian digunakan untuk penelitian. Situs yang digunakan adalah www.syariahmandiri.co.id.

2. Studi Kepustakaan

Studi pustaka adalah pengumpulan data dengan cara mempelajari dan memahami buku-buku yang mempunyai hubungan dengan *shariah enterprise theory, value added statement*, bank syariah seperti dari literatur, jurnal-jurnal, media massa dan hasil penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber, baik dari perpustakaan dan sumber lain.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Data kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dan disajikan dalam bentuk angka-angka. Data ini berupa Laporan Keuangan (*annual report*) PT. Syariah Mandiri tahun 2012, 2013, dan 2014.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Data sekunder yaitu data yang berasal dari sumber pertama berupa Laporan Keuangan (*annual report*) PT. Bank Syariah Mandiri tahun 2012, 2013, dan 2014.

3.4. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan Teknik Analisis Data Kualitatif yaitu Melakukan rekonstruksi atau mengkonversi laporan laba rugi menjadi *value added statement*, dan menganalisis rasio dengan menggunakan berbagai rumus untuk menilai tinggi rendahnya tanggung jawab perbankan syariah kepada *stakeholder*. Selanjutnya menggambarkan atau menjelaskan kondisi-kondisi keadaan aktual dari unit penelitian berupa angka-angka yang diolah dan didukung oleh tabel.



BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Konsep *shariah value added statement* sebagai pengganti laporan laba rugi lebih menyajikan informasi kinerja yang lebih luas, komprehensif dan mendekati nilai keadilan. Dalam penerapannya, *shariah value added statement* terdiri dari dua elemen kegiatan, pertama elemen kegiatan produktif yang didalamnya terdiri dari pos – pos pendapatan usaha, harga pokok input, beban penyusutan, dan beban estimasi kerugian.

Kedua, elemen kegiatan distribusi yang terdiri dari pos – pos distribusi kepada nasabah, karyawan, pemerintah, pemilik dan bank serta masyarakat. Adanya laporan nilai tambah, telah memberikan informasi yang lebih jelas bagi pemakai laporan keuangan. Laporan nilai tambah tidak hanya memberikan informasi yang berkaitan dengan keputusan ekonomi yaitu laba, tetapi juga informasi yang berkaitan dengan kewajiban zakat yang harus dibayarkan oleh perusahaan, informasi tentang besarnya gaji bagi karyawan dan informasi seputar hak bagi hasil bagi pihak ketiga.

2. Tanggung jawab Bank Syariah Mandiri kepada *stakeholders* melalui perhitungan distribusi nilai tambah menyatakan BSM bukanlah sebuah institusi yang bersifat *shareholder oriented*, dimana perusahaan hanya memiliki kepedulian dan tanggung jawab terhadap pemegang saham. Apabila menggunakan laporan laba rugi, laba hanya berorientasi pada pemegang saham saja. Dengan adanya laporan nilai tambah terlihat distribusi nilai tambah perusahaan selama ini kepada para *stakeholder*. Melalui konsep nilai tambah, BSM ternyata memiliki kepedulian yang sangat besar kepada *stakeholders* secara luas, yaitu Tuhan, manusia, dan alam. Selain itu membuktikan bahwa melalui konsep nilai tambah, BSM telah mampu memperlihatkan jika perbankan syariah telah menjalankan amanah

yaitu sebagai *khalifatullah fil ardh* yang diimplikasikan melalui pembayaran zakat dan penerapan *caelestial management* untuk meningkatkan kualitas sumber daya insani yang merupakan bagian dari pengabdian kepada Allah.

5.2 Keterbatasan

Keterbatasan dari penelitian ini adalah masih minimnya kajian-kajian ilmiah mengenai laporan keuangan perbankan syariah, khususnya tentang penerapan nilai tambah syariah sehingga dapat menciptakan perbankan syariah yang telah berdasarkan konsep islam seutuhnya.

5.2 Saran

Dengan mempertimbangkan hasil pembahasan dari bab sebelumnya, maka peneliti menyarankan ada baiknya PT. BSM bersedia menerbitkan Laporan Nilai Tambah Syariah sebagai tambahan dalam laporan keuangan yang diterbitkan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-qur'an dan Terjemahannya

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

Belkaoui, Ahmad Riahi. *Accounting Theory*, Terjemahan Ali Akbrar Yulianto, Risnawati Dermauli. Cengage Learning. London. 2006.

_____. 2000. *Teori Akuntansi Jilid 1 (Terjemahan)*. Penerbit Salemba Empat : Jakarta.

_____. 2006. *Accounting Theory edisi 5*. Salemba empat : Jakarta.

Choi, Frederik D. S. dan Gerhard G. Mueller. 1992. *Financial Reporting and Disclosure, International Accounting, 2nd ed.* New Jersey, Prentice Hall.

Faizah, Nihayatul KAP Sofyan Syafri Harahap. 2001. *Pelaporan Nilai Tambah (value added reporting) dalam konteks Akuntansi Islam*. Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi. Vol. 1 No. 2: 71-92.

Freeman, R. Edward. dkk. 2010. *Stakeholder Theory. The Satate of The Art*. UK: Cambridge University Press.

Godfrey, Hodgson, Hamilton. 2010. *Accounting Theory 7th edition*. Wiley : Australia.

Hadi, Nor. 2011. *Corporate Social Responsibility*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Hameed, S. and Yaya, R. 2003. *The Future of Islamic Corporate Reporting: Lessons from Alternative Western Accounting Reports*, Paper accepted for the International Conference on Quality Financial Reporting and Corporate Governance, Malaysia.

Haller, Axel. Herve Stolowy. 1995. *Value Added Accounting in Germany and France: A Conceptual and Empirical Comparison*. Annual Congress of the European Accounting Association. Birmingham, United Kingdom, May 10-2. campus.hec.fr.

Harahap, Sofyan Syafri. 2002. *Beberapa Dimensi Akuntansi: Menurut Al-Qur'an, Ilahiyah, Sejarah Islam dan Kini*. Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi, Vol 2. No. 2 Agustus 2002: 57 – 101.

- Iryanie, Emy. 2009. *Komitmen Stakeholder Perusahaan Terhadap Kinerja Sosial Dan Kinerja Keuangan*. Semarang: Tesis Program Studi Magister Sains
- Kam, Vernon. 1990. *Accounting Theory*. 2nd edition. Singapore: John Wiley and Son
- Karim, Adiwaman. 2003. *Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan*. The International Institute of Islamic thought Indonesia : Jakarta
- Khairandy , Ridwan. 2008. *Corporate Social Responsibility: Dari Shareholder ke Stakeholder, dan Dari Etika Bisnis ke Norma Hukum*. Yogyakarta. 6-8 Mei 2008. Workshop Tanggungjawab Perusahaan.
- Kholis, Nur. 2010. *Pajak dalam Perspektif Hukum Islam dan Aplikasinya di Indonesia*. (<http://nurkholis77.staff.uui.ac.id/wakaf-dan-upaya-memberdayakan-potensinya-secara-produktif-di-indonesia/>). 16 Mei 2012.
- Khudduri, Majid, 1999. *Teologi Keadilan Prespektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti
- Kieso, Donald E. and Jerry J. Weygandt. 2001. *Intermediate Accounting*. 10th edition. (penerj. Emil Salim). Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Kurniasari, Indah. 2011. *Implementasi Syariah Enterprise Theory*. Skripsi.Universitas Brawijaya.
- Laksmiana, Yusak. 2009. *Tanya Jawab: Cara Mudah Mendapatkan Pembiayaan Di Bank Syariah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Mandal, Niranjana and Goswarni, Suvarun. 2008. *Value Added Statement (VAS) A Critical Analysis*. Vol 2, NO. 2: 98–120.
- Meutia, Intan. 2010. *Shariah enterprise theory sebagai teori dasar pengungkapan tanggung jawab sosial Bank Islam*. Jurnal Akuntansi. Universitas Brawijaya.
- _____. 2010. *Menata pengungkapan CSR di Bank Islam (suatu pendekatan kritis)*. Jakarta : Citra Pustaka Indonesia.
- Mook, Laurie. 2003. *A social accounting framework for cooperatives: the expanded value added statement*. ACE Institute, Madison, Wisconsin.
- Muhammad. 2002. *Manajemen Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mulawarman, Triyuwono dan Ludigdo. 2006. *Rekonstruksi Teknologi Integralistik*

- Akuntansi Syariah: Shari'ate Value Added Statements*. Padang: SNA 9.
- Mulawarman, Aji Dedi. 2006. *Menyibak Akuntansi Syariah*. Yogyakarta: Kreasi Wacana
- Muwasiyah, Abbas Sayid. 2011. *Sistem Perbankan Islam berkaca pada Iran*. Sadrapress : Jakarta.
- Muthahhari, Murtadha. 1992. *Keadilan Ilahi atas Pandangan Dunia Islam*. Bandung: Mizan.
- Nurhayati, Sri. dan Wasilah. 2009. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Pohan, Hotman. 2010. *Penerapan Laporan Nilai Tambah Sebagai Upaya Meningkatkan Aspek Keadilan(Sebuah Kajian Teori Akuntansi Islam)*. Available <http://hotmanpohan.blogspot.com/2010/09/penerapanlaporan-nilaitambah-sebagai-upaya-meningkatkan-aspek-keadilan.html>.
- Qardhawi, Yusuf. 1997. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. Jakarta: Robbani Press.
- Qardhawi, Yusuf. 2007. *Hukum Zakat*. Jakarta: PT. Mitra Kerjaya Indonesia
- Resmi, Siti. 2007. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Samudro, Y. 2004. *Laporan Keuangan Nilai Tambah Sebagai Alternatif Laporan keuangan Konvensional Dalam Penilaian Kinerja Keuangan PT.Indosat Sebelum dan Sesudah Privatisasi*. Departemen Keuangan : Jakarta.
- Sitepu, Waktu. 2005. *Analisis Perbandingan Pendistribusi Laba Bersih Akuntansi Konvensional dan Akuntansi Syariah*. Bandung.
- Slamet, M. 2001. *Enterprise Theory dalam Konstruksi Akuntansi Syariah (Studi Teoritis pada Konsep Akuntansi Syariah)*. Skripsi. Malang: Fakultas Ekonomi - Universitas Brawijaya.
- Syihab, Muhammad Baiquni. 2012. *Reformasi Akuntansi Syariah: Rancang Bangun Laporan Keuangan Neraca Berbasis Syirkah Islam*. (<http://ekonomipolitikislam.blogspot.com/2012/05/reformasi-akuntansi-syariah-rancang.html>).
- Staden, Chris. 2002. *Revisiting The Value Added Statement: Social Responsibility or Social Manipulation*. Massey University, New Zealand.

- Subroto, Hendro. 2005. *Laporan Nilai Tambah Dalam Praktik Pelaporan Keuangan*. Gema, Thn. XVIII/33/2005. 26-37.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta.
- Subiyanto, Eko. Dan Iwan Triyueono. 2004. *Tafsir Sosial atas Konsep Laba dengan Pendekatan Hermeneutika*. Jawa-Timur: Bayumedia Publishing.
- Suwardjono. 2011. *Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan Edisi Ketiga*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Triyuwono, Iwan. 2000b. Akuntansi Syari'ah: Implementasi Nilai keadilan dalam Format Metafora Amanah, *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, Vol 4. No1: 1-34.
- Triyuwono, Iwan. dan Moh. As'udi. 2001. *Akuntansi Syari'ah; Memformulasikan Konsep Laba dalam Konteks Metafora Zakat*. Jakarta: Salemba Empat.
- Triyuwono, Iwan. 2006. *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- _____. 2003. Sinergi Oposisi Biner: Formulasi Tujuan Dasar Laporan Keuangan Akuntansi Syari'ah. *Journal of Islamic Economics*. Vol. 4, No. 1: 79 – 90.
- _____. 2005. *Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan (TKS) Bank Syariah*. Seminar Ekonomi dan Kewangan Islam, University Utara Malaysia. Kuala Lumpur.
- _____. 2006. *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____. 2007. *Mengangkat „Sing Liyan“ untuk Formulasi Nilai Tambah Syariah*. Simposium Nasional Akuntansi X.
- Wahyudi, Muhammad. 2005. *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Menggunakan Pendekatan Laba Rugi dan Nilai Tambah*. Semarang: Skripsi Program Sarjana Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
- Wasilah, Nurhayati. 2009. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba empat.
- Wibisono, Yusuf. 2007. *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*. Fascho Publishing. Gresik

Wibowo. Abubakar Arif. 2009. *Akuntansi Keuangan Dasar 2*. Grasindo.

Wiroso. 2010 *Akuntansi Transaksi Syariah*. Jakarta. Ikatan Akuntan Indonesia.

www.syariahmandiri.co.id

Zainul Arifin. 2002. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah Edisi 2*. Jakarta :
Alvabet Ekonomi.



Lampiran 1

**PT. BANK SYARIAH MANDIRI Tbk.
LAPORAN LABA RUGI**

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali laba bersih per saham)

PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA OLEH BANK SEBAGAI MUDHARIB	
Pendapatan dari penjualan	3.081.755.780
Pendapatan dari bagi hasil	1.232.319.358
Pendapatan dari ijarah-bersih	42.677.442
Pendapatan usaha utama lainnya	367.562.425
Jumlah Pendapatan Pengelolaan Dana	4.684.793.297
oleh Bank sebagai Mudharib	
HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL DANA SYIRKAH TEMPORER	(1.913.566.492)
HAK BAGI HASIL MILIK BANK	2.771.226.804
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA- BERSIH	1.138.747.549
BEBAN PENYISIHAN PENGHAPUSAN	
Aset Produktif	(974.558.277)
Aset Non Produktif	9.000.000
Jumlah Beban Penyisihan Penghapusan	(965.558.277)
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA	
Beban kepegawaian	(973.159.658)
Beban umum dan administrasi	(1.035.104.821)
Pemulihan (beban) estimasi kerugian	(193.089)
komitmen dan kontijensi	(42.941.658)
Beban bonus giro wadiah	(99.402.173)
Beban Lain-lain	(2.790.740.761)
Jumlah Beban Operasional	

LABA OPERASIONAL	1.119.233.592
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
Pendapatan non operasional	7.453.555
Beban non operasional	(1.422.98)
Beban Non Operasional-Bersih	(6.030.657)
LABA SEBELUM PAJAK	1.097.132.642
MANFAAT (BEBAN) PAJAK	
Pajak kini	(320.601.325)
Pajak tangguhan	29.159.243
LABA BERSIH	805.690.561
LABA PER SAHAM DASAR	3.382

Lampiran 2

**IK SYARIAH MANDIRI Tbk.
LAPORAN LABA RUGI**

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali laba bersih per saham)

PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA OLEH BANK SEBAGAI MUDHARIB	
Pendapatan dari penjualan	3.779.631.668
Pendapatan dari bagi hasil	1.247.979.859
Pendapatan dari ijarah-bersih	42.677.442
Pendapatan usaha utama lainnya	337.606.841
Jumlah Pendapatan Pengelolaan Dana	5.437.851.396
oleh Bank sebagai Mudharib	
HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL DANA SYIRKAH TEMPORER	(2.080.941.725)
HAK BAGI HASIL MILIK BANK	3.356.909.670
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA- BERSIH	1.193.418.732
BEBAN PENYISIHAN PENGHAPUSAN	
Aset Produktif	(837.322.319)
Aset Non Produktif	(34.902.784)
Jumlah Beban Penyisihan Penghapusan	(872.225.103)
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA	
Beban kepegawaian	(253.302.852)
Beban umum dan administrasi	(1.125.393.507)
Pemulihan (beban) estimasi kerugian	1.660.101
komitmen dan kontijensi	(66.907.487)
Beban bonus giro wadiah	(109.459.961)
Beban Lain-lain	(3.652.763.520)
Jumlah Beban Operasional	
LABA OPERASIONAL	897.564.882

PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
Pendapatan non operasional	9.747.808
Beban non operasional	(813.796)
Beban Non Operasional-Bersih	(8.934.011)
LABA SEBELUM PAJAK	883.836.421
MANFAAT (BEBAN) PAJAK	
Pajak kini	(255.966.222)
Pajak tangguhan	23.369.990
LABA BERSIH	651.240.189
LABA PER SAHAM DASAR	2.232

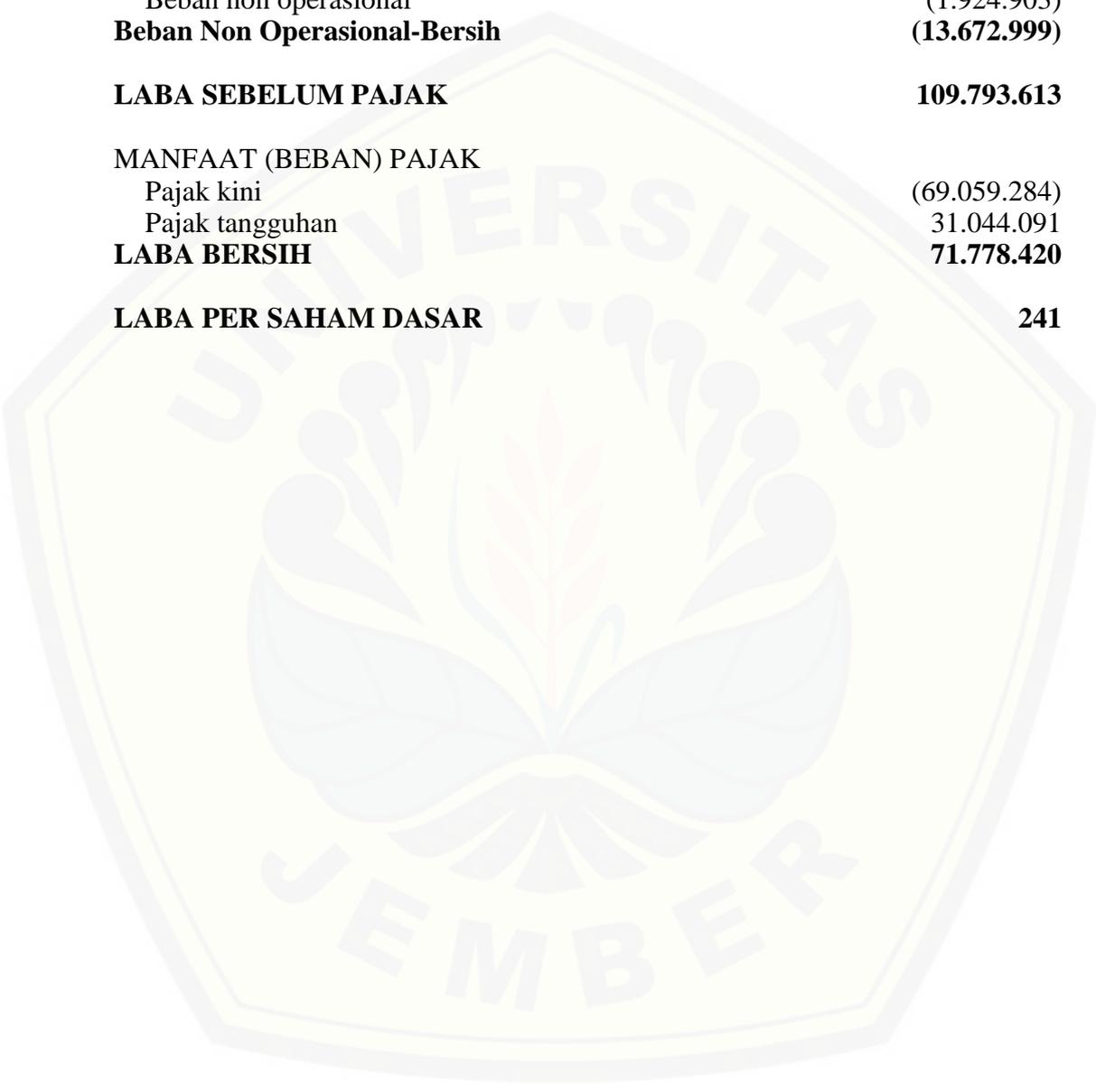
Lampiran 3

**PT. BANK SYARIAH MANDIRI Tbk.
LAPORAN LABA RUGI**

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali laba bersih per saham)

PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA OLEH BANK SEBAGAI MUDHARIB	
Pendapatan dari penjualan	3.878.230.992
Pendapatan dari bagi hasil	1.171.073.298
Pendapatan dari ijarah-bersih	25.373.925
Pendapatan usaha utama lainnya	471.883.094
Jumlah Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib	5.546.561.312
HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL DANA SYIRKAH TEMPORER	(2.451.301.867)
HAK BAGI HASIL MILIK BANK	3.095.259.444
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA-BERSIH	1.002.552.855
BEBAN PENYISIHAN PENGHAPUSAN	
Aset Produktif	(384.666.111)
Aset Non Produktif	(30.558.536)
Jumlah Beban Penyisihan Penghapusan	(415.224.647)
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA	
Beban kepegawaian	(1.359.776.221)
Beban umum dan administrasi	(1.146.908.757)
Pemulihan (beban) estimasi kerugian komitmen dan kontijensi	1.073.206
Beban bonus giro wadiah	(63.764.165)
Beban Lain-lain	(123.949.793)
Jumlah Beban Operasional	(3.998.876.464)
LABA OPERASIONAL	93.935.835



PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
Pendapatan non operasional	15.597.902
Beban non operasional	(1.924.903)
Beban Non Operasional-Bersih	(13.672.999)
LABA SEBELUM PAJAK	109.793.613
MANFAAT (BEBAN) PAJAK	
Pajak kini	(69.059.284)
Pajak tangguhan	31.044.091
LABA BERSIH	71.778.420
LABA PER SAHAM DASAR	241

Lampiran 4

ANK SYARIAH MANDIRI Tbk.

LAPORAN NILAI TAMBAH SYARIAH

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012

(Disajikan dalam ribuan Rupiah)

Pendapatan	5.830.994.400
Dikurangi	
Beban Umum dan Administrasi	(1.035.104.821)
Beban Penyisihan Penghapusan	(384.666.111)
Beban Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi	(193.089)
Beban Lain-lain	(99.402.173)
Beban Non Operasional	(1.422.898)
Zakat	(28.131.606)
Net Value Added	4.282.073.702
Distribusi Nilai Tambah Syariah	
Karyawan (gaji)	973.159.658
Pemerintah (pajak)	291.442.081
Penyandang Dana (bagi hasil)	1.913.566.492
Pemilik (Dividen)	-
Laba Ditahan	1.103.905.471
Jumlah Distribusi Nilai Tambah Syariah	4.282.073.702

Lampiran 5

PT. BANK SYARIAH MANDIRI Tbk.
LAPORAN NILAI TAMBAH SYARIAH
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013
(Disajikan dalam ribuan Rupiah)

Pendapatan	6.641.017.934
Dikurangi	
Beban Umum dan Administrasi	(1.125.393.507)
Beban Penyisihan Penghapusan	(837.322.319)
Beban Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi	1.660.101
Beban Lain-lain	(109.459.961)
Beban Non Operasional Zakat	(813.796) (22.662.472)
Net Value Added	4.547.025.980
Distribusi Nilai Tambah Syariah	
Karyawan (gaji)	1.192.402.774
Pemerintah (pajak)	232.596.232
Penyandang Dana (bagi hasil)	2.080.941.725
Pemilik (Dividen)	-
Laba Ditahan	1.041.085.249
Jumlah Distribusi Nilai Tambah Syariah	4.547.025.980

Lampiran 6

BANK SYARIAH MANDIRI Tbk.
LAPORAN NILAI TAMBAH SYARIAH
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014
(Disajikan dalam ribuan Rupiah)

Pendapatan	6.654.712.066
Dikurangi	
Beban Umum dan Administrasi	(1.146.908.757)
Beban Penyisihan Penghapusan	(974.558.277)
Beban Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi	1.073.206
Beban Lain-lain	(123.949.793)
Beban Non Operasional	(1.924.903)
Zakat	(2.815.220)
Net Value Added	4.405.628.322
Distribusi Nilai Tambah Syariah	
Karyawan (gaji)	1.359.776.221
Pemerintah (pajak)	38.015.193
Penyandang Dana (bagi hasil)	2.451.301.867
Pemilik (Dividen)	-
Laba Ditahan	556.535.041
Jumlah Distribusi Nilai Tambah Syariah	4.405.628.322